

346-082
Sus
p 21

**PELAKSANAAN PERATURAN RAHASIA BANK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 DI
INDONESIA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Program Studi Magister Kenotariatan**



Rita Susanti S.H.

B4B 000 230

PEMBIMBING

Hj. Srie Wiletno, S.H. MH

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

UPT-PUSTAK-UNDIP

**PELAKSANAAN PERATURAN RAHASIA BANK MENURUT
UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
DI INDONESIA :**

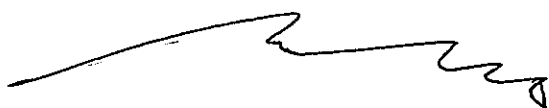
TESIS

**Disusun Oleh :
Rita Susanti, SH.
B 4 B 0 0 0 2 3 0**

Tesis ini telah dipertahankan didepan Tim Penguji
pada tanggal ...24 Maret 2003, jam 11.00 wib.....
Dan dinyatakan LULUS
Program studi Magister Kenotariatan

Telah disetujui oleh :

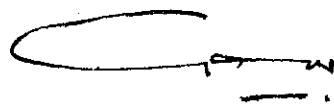
Pembimbing Utama,



Hj. Srie Wiletno, S.H. MH
NIP.

Mengetahui :

Ketua Program Studi,



Prof. IGN Sugangga, S.H.
NIP. 130.359.063

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Maret 2003

Penulis


Rita Susanti, SH.

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	5135/7/m1708/4
Tgl.	8 Okt 103

ABSTRAK
Pelaksanaan Peraturan Rahasia Bank Menurut
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Di Indonesia

Oleh :
Rita Susanti, S.H

Rahsia bank adalah : segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Masyarakat akan mempercayakan dananya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dilindungi keterangan mengenai identitas nasabah seperti : nama, alamat dan nomor rekening penyimpan pada suatu bank dan simpanannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, yang diteliti adalah “Pelaksanaan Peraturan Rahasia Bank Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 di Indonesia”.

Karena adanya argumentasi bahwa rahasia bank masih tertutup rapat, dapat digunakan untuk menutupi kecurangan selama ini yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Disisi lain, rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki bank sebagai lembaga kepercayaan yang mengelola dana masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan kebenaran dalam pembahasan permasalahan yang ada serta untuk melihat penerapan suatu aturan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan peraturan rahasia bank di Indonesia merupakan kewajiban publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000, tentang “Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank”.

Rahasia Bank bersifat universal karena hal tersebut berlaku di semua negara berlandaskan falsafah personal privacy, dan pengaturan rahasia bank, ada yang bersifat kewajiban perdata atau kewajiban publik dan ada yang berdasarkan kedua hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan perbankan masing-masing negara.

ABSTRACT

The Implementation of Bank of Secret Regulation According to Law Number 10, 1998 in Indonesia

By :

Rita Susanti, S.H.

A Bank of Secret are everything related with information about customers and their savings. People will entrust their fund to bank or using bank services if they are protected by explanations about customer's identity such as : name, address, account number of depositor and the savings.

Related to that matter, the subject to be examined is "The Implementation of Bank of Secret Regulation According to Law Number 10, 1998 in Indonesia".

Because of an argumentation states that bank of secret are still covered from public and it can be used to hide a corruption that is done by certain sides. In the other hand, bank of secret is one of the factors that should be owned by a bank as the organization that manages people's saving.

This research applies Yuridical Empirical approach. This method is conducted to gain the truth in discussing the problems and watching the implementation of regulation in society.

Based on the result of research, the Implementation of Bank of Secret in Indonesia is public obligation according to Law Number 10, 1998. If public and bank wish for, the secret of bank can be opened based on the exceptions that have been determined in Law Number 10, 1998 and the regulation of Bank of Indonesia Number 31/82/Kep. Dir, dated on December 31st, 1998 that has been renewed with the regulation of The Bank of Indonesia No. 2/19/PBI/2000, regarding on the requirement and the Regulation of giving order or written permit of socializing Bank of Secret.

Bank of Secret is universal, because it is implemented in all countries based on its privacy philosophy and the arrangement of Bank of Secret can be conducted according to civil obligation or public obligation or even both of them, based on each country's Banking Regulation.

Telanlah tantangan sebelum kau ditelannya
Karena memang udara yang kita hirup bersenyawa
dengan tantangan itu
Dan menghasilkan dua kemungkinan;
Berhasil atau Gagal

Kegagalan atau penderitaan adalah sejalan
Tetapi jangan engkau lari kepada mimpi
Karena racun selalu menanti disana
Janganlah terlalu lama menoleh ke belakang
Karena jalan didepanmu jauh lebih penting

Tebaslah belantaranya, dengan segenap sikap keperkasaan
Jadikan tanah lapang
Dan mainkanlah hidupmu

Semarang, Maret 2003

Penulis

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Atas berkat rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "PELAKSANAAN PERATURAN RAHASIA BANK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 DI INDONESIA". Pelaksanaan tesis ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak.

Kupersembahkan kehadiran Bunda tercinta, Kakakku dr. Arman Moechtar. DSB.ONK, rasa hormat dan banggaku yang selalu mendo'akan tak henti – hentinya sampai hari ini, Kakak – kakak terbaikku yang dengan kasih sayang selalu memberi dukungan dan nasehat serta melindungi demi kesuksesan penulis.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budiardjo MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr. Sp. PD (K) selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. IGN. Sugangga, S.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak R. Suharto, S.H, Mhum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Selaku Dosen Penguji Tesis.
5. Ibu Hj. Srie Wiletno, S.H. MH. selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini yang dari awal proses penulisan proposal telah memberi masukan dan meluangkan banyak waktunya disamping kesibukan beliau dalam menjalankan tugas sehari – hari, masih bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini, penuh kesabaran dan senyum keikhlasan.
6. Bapak H. A. Thulus Sartono, S.H. MH, selaku Dosen Penguji Tesis.
7. Bapak Ery Agus Priyono, S.H. MSi selaku Dosen Penguji Tesis.

8. Ibu Prof. Dr. Sri Rezeky, SH. Atas petunjuk dan wawasan ilmu yang beliau masukkan dalam penyelesaian tesis ini.
9. Segenap Guru Besar dan Staff Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang serta Staff Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan, yang telah melayani kebutuhan penulis selama mengikuti Pasca Sarjana.
10. Bapak Khairil Ziyadi, Ibu Maria Dea, Ibu Karlina yang sangat membantu penulis melakukan penelitian pada BI Semarang.
11. Bapak Daeng. A. Indra dari Institut Bankir Indonesia (IBI) Jakarta.
12. Teman – teman seperjuangan Angkatan 2000 Magister Kenotariatan, Lia, Eva, Maya, Galuh Pitaloka, dan Ryan atas semangat serta dorongan dalam penyelesaian tesis ini.
13. Seluruh Civitas Akademika Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu penulis untuk membuka cakrawala ilmu yang lebih luas selama penulis menjadi mahasiswa.
14. dr.Purna Irawan, Sp.T atas semangat yang begitu berarti dalam penyelesaian tesis ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna maka dengan kerendahan hati penulis mohon saran dan kritik yang membangun dan bermanfaat dari semua pihak.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat guna ilmu pengetahuan khususnya dalam dunia Perbankan serta masyarakat pengguna jasa perbankan.

Semarang, Maret 2003

Penulis,

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Permasalahan	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Sistematika Penulisan	17
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 18
2.1. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dan Lembaga Kepercayaan	18
2.1.1. Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi	18
2.1.2. Bank Sebagai Lembaga Kepercayaan	26
2.2. Rahasia Bank Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan	40
2.2.1. Lingkup Rahasia Bank	40
2.2.2. Pihak – pihak Yang Berwajib Merahasiakan	58
A. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pegawai Bank	58
B. Mantan Anggota Direksi, Komisaris dan Pegawai Bank	62
C. Pemegang Saham	64
D. Pihak Pemberi Jasa Bagi Bank	66
E. Keluarga Pengelola Bank	68

2.3. Kepentingan Umum Dan Kepentingan Bank Versus Kepentingan Nasabah	76
2.3.1. Kepentingan Umum Versus Kepentingan Nasabah	77
2.3.2. Kepentingan Bank Versus Kepentingan Nasabah	90
BAB III METODE PENELITIAN	93
A. Metode Pendekatan	94
B. Spesifikasi Penelitian	96
C. Metode Penentuan Sampel	97
D. Teknik Pengumpulan Data	98
1. Data Primer	98
2. Data Sekunder	99
E. Metode Penyajian Data	99
F. Metode Analisa Data	100
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	101
A. Hasil Penelitian	101
1. Pelaksanaan Peraturan Rahasia Bank Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998	101
B. Pembahasan	110
1. Pelaksanaan Peraturan Rahasia Bank Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998	110
2. Benturan Kepentingan Umum dan Kepentingan Nasabah Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998	118
a. Kepentingan Umum Versus Kepentingan Nasabah	118
b. Kepentingan Bank Versus Kepentingan Nasabah	132
BAB V PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang peranannya sangat penting bagi pembangunan negara. Peranan perbankan tidak hanya bersifat Domestik, tetapi juga Internasional.

Peran bank sebagai lembaga keuangan meliputi : Perkreditan, Tabungan, Deposito dan lain sebagainya. Selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negara, juga berperan untuk mensejahterakan rakyat.

Di luar negeri, peranan perbankan adalah sebagai jembatan antara Dunia Internasional dalam lalu lintas devisa, Hubungan moneter dan Perdagangan.

Fungsi utama bank di Indonesia adalah sebagai wahana penghimpun dan penyalur dana masyarakat secara efektif dan efisien, dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional serta berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati - hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati - hatian ini adalah dalam rangka peningkatan perlindungan kepada nasabah bank dalam melakukan kegiatannya. Kegiatan tersebut diserahkan oleh pemerintah kepada beberapa lembaga, antara lain adalah bank.

Karena peranan perbankan yang strategis untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional, maka haruslah senantiasa diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih oleh Bank Indonesia. Pembinaan dan pengawasan bank merupakan salah satu upaya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat.

Dalam dekade pertama, yaitu sejak tanggal 1 Juni 1983, kehadiran lembaga perbankan dalam masyarakat, merupakan kebutuhan yang mendasar, karena lembaga ini (Lembaga Perbankan) berperan penting dalam memberi bantuan kepada masyarakat yakni melayani pemberian kredit. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang ini maka bank berfungsi sebagai Lembaga Perkreditan. Untuk memantapkan fungsi bank sebagai lembaga perkreditan tersebut, bank terlebih dahulu berfungsi sebagai penyimpan dana bagi masyarakat. Kegiatan menghimpun dana masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Kegiatan bank tersebut menyangkut kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang menyimpan dananya. Karena masyarakat penyimpan dana tersebut mempunyai kepentingan atas keselamatan simpanan dananya, selain dengan harapan memperoleh bunga dari dana yang disimpan, juga haruslah sangat diperhatikan bahwa bank tersebut harus dalam keadaan "sehat". Oleh karena itu, timbul adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang saling berkaitan, yaitu saling mempercayai. Salah satu bentuk dari saling mempercayai ini adalah bahwa apa – apa yang diketahui oleh bank dari diri nasabahnya akan dirahasiakan dan tidak akan dibuka kepada

siapapun kecuali atas dasar peraturan hukum yang berlaku. Untuk itulah maka perbankan disebut juga sebagai lembaga kepercayaan (*Agent of Trust*).

Adanya kerahasiaan bank tersebut merupakan salah satu pemenuhan atas kebutuhan nasabah (masyarakat) dimana nasabah (masyarakat) tersebut membutuhkan rasa aman dan menjadi daya tarik untuk menyimpan uang.

Tujuan dana yang disimpan pada bank dapat dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk itu dana simpanan masyarakat harus dilindungi oleh hukum dan diperlukan adanya hukum kerahasiaan.

Hukum kerahasiaan adalah hukum yang berisikan kaidah – kaidah yang berkaitan dengan perlindungan rahasia, baik menyangkut rahasia perdagangan, rahasia yang sifatnya pribadi atau mengenai rahasia pemerintah. Hubungan antara nasabah dengan bank merupakan bagian dari rahasia bank, dan rahasia bank merupakan salah satu bagian yang dilindungi oleh hukum kerahasiaan. Dasar alasan yang melandasi hukum kerahasiaan ini adalah bahwa hukum tersebut dapat mencegah seseorang untuk membuka atau membocorkan informasi yang diberikan kepadanya, atau menyalahgunakan informasi yang diketahuinya tersebut.¹

Agar sambutan masyarakat terhadap kehadiran lembaga perbankan cukup positif, perlu diperhatikan citra lembaga perbankan tersebut sebagai lembaga penyimpan dana yang aman bagi masyarakat. Dalam hal ini perlu

1 Muhamad Djumhana, Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia), Bandung, 1996. Citra Aditya Bakti, halaman 130.

pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga perbankan yang dilakukan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia.

Tugas yang diemban Bank Indonesia menjadikannya mempunyai wewenang, serta berkewajiban untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap lembaga perbankan dengan menempuh langkah baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan – ketentuan, petunjuk, nasehat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan atau pengenaan sanksi.

Arti penting lembaga perbankan didalam masyarakat secara eksplisit ditegaskan di dalam Undang - Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam Pasal 46, dinyatakan sebagai berikut :

1. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang - kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang - kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).
2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perserikatan, Yayasan, atau Koperasi. Penuntun terhadap badan - badan yang dimaksud dilakukan oleh bank terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang berhak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua - duanya.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa satu - satunya lembaga yang diizinkan secara yuridis untuk menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti : Giro dan Deposito, hanyalah Lembaga Perbankan.

Oleh karena itu Pembinaan dan Pengawasan terhadap Lembaga Perbankan diperlukan. Hal ini diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang - Undang No.10 Tahun 1998, sebagai berikut :

“Memperhatikan sektor perbankan yang memiliki posisi strategis, maka pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia (BI), sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan bertanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak memenuhi atau mematuhi peraturan perbankan yang berlaku”.

Dengan demikian Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank dan atau pembukuan suatu kantor bank.

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, karenanya kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok eksistensi suatu bank. Dalam hal ini, kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah kepentingan masyarakat banyak.²

Unsur yang paling pokok untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank tergantung pada kemampuan bank untuk memegang “Rahasia Bank”.

2 Sutan Remy Sjahdeini, Rahasia Bank Suatu Dilema, Jakarta : 15 September 1997, hal. 2.

Rahasia Bank menurut Undang – Undang No.10 Tahun 1998 dijelaskan pada Pasal 40 ayat 1, yaitu mencakup keterangan tentang segala sesuatu mengenai nasabah penyimpan dana.

Pengertian Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan keuangan dan hal - hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dalam dunia perbankan perlu dirahasiakan oleh bank. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman, wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal - hal lain dari orang dan badan hukum yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Bank diberi amanat oleh nasabah yang menyimpan dana untuk tidak mengungkapkan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kepada pihak lain, kecuali yang menyangkut tentang pajak dan kepentingan penyelidikan.

Secara teori, tujuan dari rahasia bank adalah untuk melindungi dana masyarakat yang disimpan bank, mengingat masyarakat hanya mau menjadi nasabah bank apabila ada jaminan bahwa rekeningnya dapat dijamin kerahasiaannya sehingga tidak dapat disalah gunakan (dalam bentuk kejahatan) oleh pihak manapun juga, baik oleh intern bank maupun pihak ketiga bekerja sama dengan oknum intern bank, artinya Rahasia Bank ditujukan untuk melindungi kekayaan nasabah penyimpan dana terhadap upaya – upaya untuk mempublikasikan dana mereka di bank selain yang dibolehkan pada Pasal 40 Undang – Undang No 10 Tahun 1998.

Guna lebih melindungi kepentingan masyarakat khususnya simpanan nasabah bank, Undang - Undang Perbankan juga mewajibkan pihak terafiliasi seperti yang dimaksud pada Pasal 1 butir 1.d Undang - Undang No 10 Tahun 1998 untuk merahasiakan hal - hal yang termasuk dalam rahasia bank.

Pelaksanaan ketentuan rahasia bank menurut Undang - Undang No 10 Tahun 1998 sampai saat ini dipegang teguh oleh Bank Indonesia, bank - bank pelaksana dan pihak - pihak terafiliasi seperti yang dimaksud pada pasal 1 butir 1d Undang - Undang No 10 Tahun 1998. Khusus Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, pelaksanaan ketentuan rahasia bank menurut Undang - Undanh No 10 Tahun 1998 tersebut ditindak lanjuti dengan mengeluarkan aturan - aturan pelaksana seperti yang terakhir diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.2/19/PBI/2000,tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Menurut Pasal 40 Undang - Undang No.10 Tahun 1998, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ini berarti untuk menjamin kepercayaan masyarakat kepada perbankan, rahasia bank dapat dipegang teguh oleh bank.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kewajiban yang dibebankan kepada bank untuk menyimpan rahasia bank ditetapkan sebagai kewajiban hukum yang harus dijunjung tinggi karena berderajat undang - undang walaupun hal tersebut masih dapat disimpangi oleh pengecualian yang ditetapkan oleh undang - undang.

Sebelum berlakunya Undang - Undang No.10 Tahun 1998, kewajiban - kewajiban yang dibebankan oleh Undang - Undang No.7 Tahun 1992, bahwa bank menjamin dana simpanan masyarakat dan bank dalam keadaan sehat. Bank yang sehat merupakan jaminan keamanan simpanan dana nasabah karena dapat dipercaya untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah. Dalam hal ini merupakan wujud perlindungan bagi dana nasabah masyarakat luas.

Undang - Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, baru berumur 6 tahun telah dilakukan kembali revisinya, apabila dibandingkan dengan Undang - Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok - pokok Perbankan yang mampu bertahan sekitar 25 tahun. Lahirnya Undang - Undang No 10 Tahun 1998 adalah akibat perkembangan yang sangat cepat dalam bisnis perbankan nasional, terutama pada tahun 1997 dan tahun 1998. Kenyataan ini antara lain akibat terjadinya krisis moneter, serta buruknya kinerja perbankan nasional khususnya berkaitan dengan tingkat kesehatan bank, maka pemerintah memandang perlu untuk melakukan perubahan - perubahan terhadap Undang - Undang No 10 Tahun 1998.

Masyarakat merasa sangat tidak puas atas rumusan rahasia bank sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1992. Masyarakat berpendapat bahwa rumusan itu terlalu jauh, karena sampai mencakup kredit bank yang diberikan kepada nasabah. Masyarakat berpendapat bahwa seyogyanya lingkup rahasia bank hanya meliputi dana simpanan nasabah saja (aktiva bank), dirasakan oleh masyarakat sebagai memperkosa atau memasung hak masyarakat untuk mengetahui kredit-kredit

macet perbankan yang sangat mempengaruhi kesehatan perbankan. Sehubungan dengan itu, maka rumusan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) UU No. 7 tahun 1992 telah diubah dengan definisi baru sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 40 Ayat (1) yang baru dalam UU No. 10 tahun 1998. Menurut rumusan Pasal 40 ayat (1) tersebut, lingkup rahasia bank ditegaskan hanya terbatas kepada simpanan nasabah (pasiva bank).³

Selain itu hal tersebut terjadi karena dinamika perbankan yang berada dalam era globalisasi. Pemberlakuan Undang - Undang No.10 Tahun 1998 memberikan pengaruh negatif maupun positif lebih dinamis dalam kehidupan perbankan nasional. Namun di sisi lain diperlukan kesiapan bank dalam menghadapi era pasar bebas ke pentas Internasional.

Perbedaan yang mendasar menyangkut kerahasiaan bank antara Undang – Undang No 7 tahun 1992 dengan Undang – Undang No 10 Tahun 1998 adalah dalam hal ruang lingkup keterangan yang wajib dirahasiakan yaitu dari keterangan nasabah penyimpan dan nasabah penabung pada Undang – Undang No 7 Tahun 1992 menjadi hanya keterangan mengenai nasabah penabung saja pada Undang – Undang No 10 Tahun 1998.

Pengaturan rahasia bank dalam Undang - Undang No.14 Tahun 1967 adalah sama dengan pengertian yang diatur dalam Undang - Undang No.7

3 Berkaitan dengan lingkup yang wajib dirahasiakan, rumusan Pasal 40 Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 secara eksplisit disebutkan bahwa lingkup rahasia bank adalah menyangkut bukan saja simpanan nasabah, tetapi juga identitas nasabah penyimpan yang memiliki simpanan itu, lihat Sutan Remi, Rahasia Bank : Berbagai Masalah Di Sekitarnya, halaman 7, Jurnal Hukum Bisnis, ———

Tahun 1992. Pengaturan rahasia bank dalam Undang - Undang No.14 Tahun 1967, terdapat didalam Bab VII dengan judul "Ketentuan lain".

Dijelaskan dalam Pasal 36 Undang - Undang No.14 Tahun 1967, rumusan rahasia bank menggunakan kata "Harus" , dan pada akhir kalimat dicantumkan pengecualian yang bersifat umum tanpa dinyatakan pasal terkait. Dalam Pasal 40 Undang - Undang No.7 Tahun 1992, rumusan rahasia bank dengan menggunakan kata "Wajib" , dan pada akhir kalimat dicantumkan secara spesifik pasal - pasal terkait.

Sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang, mengenai perbankan di Indonesia mengalami berbagai perkembangan kebijakan, tidak demikian halnya dengan ketentuan rahasia bank. Pada prinsipnya, sejak pertama kali diatur dengan Undang - Undang No.23 Prp Tahun 1960 sampai dengan peraturan Undang - Undang No.7 Tahun 1992, ketentuan rahasia bank tidak banyak mengalami perubahan.

Sebelum berlakunya Undang - Undang No. 23 Prp Tahun 1960, tentang rahasia bank, pada dasarnya pengaturan rahasia bank di Indonesia tunduk pada kebiasaan dan kelaziman yang terdapat dalam dunia perbankan.

Berbagai peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang rahasia bank, antara lain diatur dalam Pasal 322 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Ketentuan ini merupakan landasan yuridis untuk memberlakukan rahasia bank sebelum dikeluarkannya pengaturan tentang rahasia bank.

Pada dasarnya rahasia bank sangat diperlukan untuk kepentingan bank dan nasabah yang memerlukan kepercayaan masyarakat penyimpan dana di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya di bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank memberikan jaminan bahwa bank tidak akan mengungkapkan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Falsafah rahasia bank yang berlaku secara universal tidak terlepas dari eksistensi rahasia bank yang terdapat di setiap negara.

Dasar berlakunya kewajiban menyimpan rahasia bank untuk setiap negara tidak selalu sama, ada yang termasuk dalam kategori Hukum Publik dan ada yang termasuk kedalam kategori Hukum Perdata dan banyak pula negara yang memberlakukan rahasia bank atas dasar ke 2 jenis hukum tersebut.

Dalam Hukum Publik, kewajiban menjaga rahasia bank diatur dalam peraturan Perundang - undangan (Statutory Duty), dan atas pelanggaran diancam dengan sanksi pidana atau sanksi administratif.

Dalam Hukum Perdata, kewajiban menjaga rahasia bank selain ada yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan undang - undang perbankan yang bersifat perdata, tetapi banyak pula yang hanya berdasarkan hubungan antara perikatan bank dengan nasabah (*Contractual Basis*).⁴

Bank akan melindungi kekayaan nasabah serta beberapa kategori informasi yang menyangkut kegiatan usaha nasabah seperti : giralisasi,

pembayaran gaji, data kekayaan finansial nasabah dan aktifitas nasabah debitur. Dalam hal perlindungan nasabah, ketentuan rahasia bank pada dasarnya hanya ditujukan kepada nasabah yang beritikad baik.

Apabila nasabah beritikad tidak baik dalam arti dana simpanan nasabah Illegal, kemudian terjadi kasus maka rahasia bank dalam hal ini dapat dimintai keterangannya untuk dibuka menurut syarat - syarat dan prosedur ketentuan Undang - undang Perbankan yang berlaku.

Ketentuan rahasia bank ini diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya. Bank yang membocorkan informasi yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi berat. Di sinilah terlihat bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama karena kepentingan masyarakat harus dilindungi, yaitu perbankan bukanlah lembaga yang bisa dijadikan tempat untuk penyalahgunaan kewenangan atau tempat kerja sama bagi mereka yang melanggar hukum dalam menjalankan kegiatan mengambil dana dari masyarakat melalui hal yang tidak wajar. Selain hal tersebut diatas, lembaga perbankan dengan ketentuan kerahasiaan bank, dibuat sebenarnya bukan untuk disalahgunakan. Salah satu bentuk tersebut sering menggunakan kerahasiaan bank untuk praktek pemutihan uang (Money laundering), yaitu uang haram atau hasil kejahatan, yang dengan berbagai cara akhirnya dapat didayagunakan seperti layaknya uang yang bersih. Dengan adanya penyalahgunaan asas kerahasiaan bank untuk melakukan tindakan di luar

4 Sadikin. BPHN Departemen Kehakiman Nasional RI, tahun 1995/1996, hal. 3.

hukum, maka sekarang ini ketentuan kerahasiaan bank di banyak negara mengalami perubahan.

Timbulnya perbedaan pengertian rahasia bank, karena perbedaan kepentingan dan fungsi dari masing - masing pihak. Disatu sisi kepentingan perbankan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, dan disisi lain kepentingan instansi yang mempunyai kewenangan dibidang penyidikan atau pemeriksaan keuangan.

Dengan demikian kepentingan masing - masing pihak menimbulkan perbedaan persepsi dalam menafsirkan ketentuan rahasia bank.

Terlepas dari pro dan kontra tentang keberadaan rahasia bank perlu diketahui lebih dahulu yang menjadi tujuan dari rahasia bank itu sendiri.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa tujuan dari rahasia bank dijadikan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan adanya sarana ini, simpanan nasabah bank dijamin oleh ketentuan rahasia bank.

Dalam penjelasan Undang - Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa, Aturan rahasia bank selama ini sangat tertutup sehingga dapat digunakan untuk menutupi kecurangan yang dilakukan pihak tertentu maka perlu ditinjau ulang.

Namun mengingat rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki dalam fungsinya sebagai lembaga kepercayaan yang mengelola dana masyarakat, tidak seluruh aspek yang ditata usahakan pada bank merupakan hal - hal yang dapat diketahui oleh umum.

Selanjutnya, hal – hal yang berkenaan dengan kewajiban bank untuk melindungi khususnya mengenai data nasabah penyimpan dan simpanannya tetap merupakan rahasia bank, sedangkan hal – hal lain yang berkenaan dengan kegiatan penyaluran dana dalam masyarakat oleh bank, bukan merupakan rahasia bank lagi.

Ketentuan rahasia bank di Indonesia yang berlaku sekarang, merupakan bagian dari ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, begitu juga pada Undang – Undang Perbankan sebelumnya yaitu Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok – pokok Perbankan. Berbeda dengan kondisi tersebut maka sebelum lahirnya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1967, mengenai rahasia bank diatur tersendiri dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang, yaitu Perpu Nomor 23 Tahun 1960, tentang Rahasia Bank.

Sebelum direvisi, pengertian rahasia bank diatur dalam pasal 1 Angka 16 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan menetapkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal – hal lain dari nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Selanjutnya, Pasal 40 undang – undang yang sama menetapkan bahwa dilarang memberikan keterangan tercatat tentang keadaan keuangan dan hal – hal lain dari nasabahnya yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ketentuan tersebut berlaku bagi pihak terafiliasi.

Ini berarti bahwa ketentuan rahasia bank ditafsirkan secara luas dan relatif ketat dengan meliputi sisi pasiva maupun aktiva, bahkan dalam pelaksanaannya termasuk hal – hal yang tercatat di dalam rekening administratif.⁵

Ketentuan rahasia bank yang bersifat luas dan ketat tersebut di satu sisi bersifat positif bagi kelangsungan hidup lembaga perbankan karena akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, tetapi di sisi lain menjadi kendala bagi masyarakat untuk dapat mengungkapkan kredit macet perbankan yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat penyimpan uang.⁶

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penelitian yang dilakukan ini dalam rangka penulisan tesis, dilakukan pada “Perlindungan dana yang disimpan nasabah bank dalam kaitannya dengan rahasia bank.”

Adapun topik yang hendak ditulis adalah “Pelaksanaan Peraturan Rahasia Bank Menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998”.

B. PERMASALAHAN

Penelitian tersebut diatas, dituangkan dalam bentuk tulisan dan bermaksud membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan peraturan rahasia bank menurut Undang - Undang No.10 Tahun 1998 .

5 Sadikin, Op.cit., halaman 33.

6 Ibid, halaman 11.

2. Bagaimana cara mengatasi permasalahan apabila terjadi benturan antara kepentingan umum dan kepentingan nasabah bank, menurut Undang - Undang No.10 Tahun 1998 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan peraturan rahasia bank yang terkandung dalam Undang - Undang No.10 Tahun 1998.
2. Cara mengatasi jika terjadi benturan kepentingan umum dan kepentingan nasabah bank menurut Undang - Undang No.10 Tahun 1998.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu untuk perbankan, pendidikan hukum, penelitian hukum dan penyuluhan hukum bagi para pihak penyimpan dana di bank.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan studi lanjutan untuk melengkapi materi hukum.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai kontribusi yuridis kepada pengambilan keputusan dalam bidang perbankan, masyarakat pengusaha penyimpan dana pada bank, kalangan praktisi

hukum, peminat industri perbankan, asuransi, serta masyarakat penyimpan dana pada umumnya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang permasalahan, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian tentang Bank sebagai lembaga intermediasi dan sebagai lembaga kepercayaan, Rahasia bank menurut Undang Undang Nomor 10 tahun 1998, Kepentingan umum dan kepentingan bank versus kepentingan nasabah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi uraian tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode populasi dan sampling, metode pengumpulan data, metode penyajian data serta metode analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian tentang hasil penelitian yang telah dilakukan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Berisi uraian tentang kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. BANK SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI DAN LEMBAGA KEPERCAYAAN

2.1.1. Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi

Sebelum penguraian fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian bank. Sebagai gambaran umum, berikut ini dikutip beberapa pendapat tentang bank.

- a. Menurut O.P. Simorangkir, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa - jasa. Adapun pemberian kredit tersebut dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana - dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat - alat pembayaran yang berupa uang giral.⁷
- b. Didalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan diuraikan oleh A.Abdurrachman bahwa bank adalah jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti pemberian pinjaman, pengedaran mata uang, pengawasan terhadap mata uang,

7. O.P.Simorangkir, Dasar - Dasar dan Mekanisme Perbankan, Jakarta: Yograti, 1983, Cetakan ke 4, halaman 18.

bertindak sebagai tempat penyimpanan benda - benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain - lain.⁸

c. Hart sebagaimana dikutip oleh J. Milnes Holden menguraikan :

*A banker or bank as a person or company carrying on the business of receiving moneys, collecting drafts, for customers subject to obligation of honouring cheques drawn upon them from time by the customers to extent of the available on their current accounts.*⁹

d. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang - Undang No.10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis formal merupakan subyek hukum, yang dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya bank diwakili oleh para pengurusnya.

Definisi bank seperti dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 2 diatas harus dikaitkan dengan Pasal 3, yaitu tentang tugas utama perbankan di Indonesia. Pada dasarnya tugas pokok bank terdiri dari tiga hal :

-
8. A.Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, ----
 9. J. Milnes Holden, The Law and Practise of Banking Vol. Banker and Customer. London : Pitmen Publishing, 1980, page 2.

- a. menerima simpanan atau dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank,
- b. upaya pengerahan dana (*raising funds*) masyarakat,
- c. sebagai perantara (*intermediary institution*) antara nasabah penyimpan dana dan nasabah dalam perkreditan.¹⁰

Karena keberadaan bank diperlukan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Untuk itu, dirasakan pentingnya lembaga perbankan khususnya bank umum yang merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan - badan pemerintah dan swasta maupun perorangan untuk menyimpan dana - dananya. Sebaliknya, bank menyalurkan kredit dan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹¹

Dengan demikian, keberadaan bank semakin penting jika dikaitkan dengan transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat modern saat ini. Sebagai contoh, sistem pembayaran yang dilakukan telah menggunakan pembayaran secara giral. Yang dimaksud dengan pembayaran secara giral adalah pembayaran yang dilakukan dengan

10 Lihat dan bandingkan Simorangkir, Op.Cit., halaman 3.

11 Suyatno, dkk. Op.Cit., halaman xi.

menggunakan instrumen surat berharga seperti cek, giro bilyet dan surat - surat berharga lain yang dapat digunakan dalam kebiasaan dunia perbankan.

Hal tersebut dapat dilihat dalam kontrak bisnis selalu ditemukan klausul seperti *Document Against Payment (DP)* atau *Document Against Acceptance (DA)*, yang berarti pembayaran baru dapat dilakukan apabila dokumen telah diserahkan atau diakseptasi oleh penjual kepada pembeli. Selanjutnya, pembayaran tidak dilakukan dengan uang tunai, melainkan menggunakan instrumen surat berharga. Ini berarti keterlibatan lembaga perbankan dalam pembayaran harus diikutsertakan karena bank yang memiliki instrumen tersebut.

Dalam ketentuan Undang - Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah dirumuskan fungsi bank dalam Pasal 3 bahwa fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 3 tersebut, dapat diketahui bahwa fungsi utama bank sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana penghimpun dana masyarakat. Untuk merealisasikan fungsi ini, bank harus menjalankan usahanya secara profesional sehingga masyarakat percaya untuk menyimpan dana di bank akan aman. Selain itu dengan menggunakan jasa perbankan mempermudah aktivitas masyarakat penyimpan dana.
- b. Sebagai sarana penyalur dana kepada masyarakat, bank mengumpulkan dana tersebut. Selanjutnya dana disalurkan kembali

kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Oleh karena itu bank mempunyai kewajiban untuk membayar bunga kepada penyimpan dana. Untuk itu, bank dalam memberikan kredit menetapkan bunga kredit yang lebih besar dari bunga dana simpanan masyarakat. Dilain pihak, bank membutuhkan biaya - biaya dalam melaksanakan kegiatannya. Dilihat dari sudut pandang ini, bank berfungsi sebagai tempat mencari dana bagi masyarakat. Dengan kata lain, adalah tempat menjual kredit (*Bank is a shop for sale of credit*).¹²

Selain kedua fungsi tersebut diatas, lembaga perbankan di Indonesia mempunyai misi tersendiri seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang - Undang No.10 Tahun 1998. Dalam pasal ini dinyatakan,

"Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak".

Dengan demikian, suatu bank sebagai badan usaha yang tidak semata - mata bertujuan bisnis, tetapi mempunyai misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, suatu bank sebagai badan usaha yang tidak semata - mata bertujuan bisnis, tetapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

12 Baca Suyatno, dkk., Op.cit., halaman 20.

Karena bank adalah sebagai lembaga intermediasi yang bekerja dengan menggunakan dana milik masyarakat, mengerahkan dana simpanan masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit, bank bukan suatu perusahaan biasa berbeda dengan perusahaan lain. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara.

Dilihat dari segi ini, jika suatu bank berdiri dan memperoleh izin usaha untuk beroperasi, bank tersebut bukan hanya milik para pemegang saham bank saja, tetapi juga telah menjadi milik masyarakat.¹³

Untuk itu, eksistensi suatu bank tergantung atas kesediaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di suatu bank yang bersangkutan.

Salah satu dari sekian banyak usaha bank adalah memberi kredit. Pemberian kredit tersebut harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian karena setiap pemberian kredit oleh lembaga perbankan akan mengandung resiko kegagalan atau kemacetan. Dengan demikian, untuk pelaksanaan pemberian kredit, bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Untuk itu, dalam pelaksanaan pemberian

13 Remy Sjahdeini, Likuidasi dan Tanggung Jawab Pengurus dan Pemegang Saham terhadap Pihak Ketiga, Jakarta 30 Maret 1998, halaman 3.

kredit diperlukan pengawasan untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dalam garis besarnya dapat dibedakan atas pengawasan langsung (*on-site examination*) dan pengawasan tidak langsung (*on-site supervision*).

Namun, dalam praktek yang berlangsung selama ini walaupun kadangkala Bank Indonesia melakukan pemeriksaan langsung terhadap pemberian kredit oleh sebuah bank, Bank Indonesia cenderung lebih menekankan perhatiannya pada pelaksanaan pengawasan tidak langsung dalam bentuk *post audit*, artinya Bank Indonesia cenderung memusatkan perhatiannya pada pemantauan pemenuhan asas pemberian kredit oleh tiap - tiap bank.

Apabila diperhatikan uraian tersebut di atas, di lain pihak besar sekali kepentingan masyarakat penyimpan dana terhadap terjaminnya eksistensi suatu bank. Bubarnya suatu bank tidak sekedar menyangkut kepentingan pemegang saham bank saja, tetapi juga kepentingan sistem keuangan dan pembayaran suatu negara serta kepentingan masyarakat penyimpan dana. Kepentingan nasabah jauh lebih besar daripada sekedar kepentingan para pemegang saham bank tertentu. Hal tersebut berkaitan dengan kesediaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank yang bersangkutan. Kesediaan itu akan diperoleh oleh bank apabila masyarakat mempunyai kepercayaan

kepada suatu bank. Untuk itu, lembaga perbankan dikenal sebagai lembaga kepercayaan.

Mengingat hal yang demikian itu, jika suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter dari negara yang bersangkutan, bank tersebut telah menjadi "milik" masyarakat oleh karena eksistensinya bukan hanya harus dijaga oleh para pemilik bank itu, tetapi juga harus dijaga oleh masyarakat. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting jika diingat bahwa *domino effect*, yaitu : menular kepada bank - bank yang lain pada ambruknya suatu bank, akan mempunyai akibat rantai atau gilirannya tidak mustahil dapat mengganggu fungsi sistem keuangan dan fungsi pembayaran dari negara yang bersangkutan. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1929 - 1933 ketika kurang lebih 9000 bank di Amerika Serikat, atau kurang lebih setengah dari jumlah bank yang ada ambruk secara berantai ketika terjadi *Great Depression*.¹⁴

Oleh karena itu, diperlukan informasi untuk nasabah penyimpan dana yaitu informasi mengenai tingkat bonafiditas bank tersebut dari kegiatan yang menjadi sasaran penggunaan dan penempatan dana. Apabila informasi telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut perlu dilaksanakan oleh bank, dalam hal bertindak sebagai perantara dalam penempatan dana

14 Remy Sjahdeini, Op.Cit., Bank Suatu Dilema, halaman 1.

nasabah atau membeli/menjual surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabah.

Peranan lembaga perbankan yang demikian strategis sebagai lembaga intermediasi dan menunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian saat ini guna mencapai tingkat penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional. Dengan demikian, bank diharapkan mampu menghadapi persaingan yang bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepada suatu bank, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang - bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional.

2.1.2. Bank Sebagai Lembaga Kepercayaan

Bank merupakan lembaga keuangan, dalam kegiatannya dapat membantu kepentingan setiap perusahaan ataupun perorangan yang akan memanfaatkan jasanya. Dalam hal ini, arus barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan lancar karena lalu lintas pembayaran dapat berjalan lebih efisien. Meskipun demikian, bagi suatu bank cara dan mutu pemberian pelayanan jasa bank adalah penting. Untuk itu, bank harus beroperasi secara sehat dan memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada nasabahnya. Dengan demikian, kepentingan semua pihak dapat dilayani.

Laporan bank dunia menunjukkan bahwa bobroknya sistem perbankan, bahkan jauh sebelum krisis terjadi merupakan munculnya bank sakit akibat terlalu dibebani ekspansi kredit yang pesat, terus mengucurkan kredit untuk kelompoknya sendiri. Standar kelayakan pemberian kredit dilanggar tanpa terkena sanksi. Banyak bank yang modalnya tidak mencukupi, beberapa diantaranya sudah insolven sebelum masa krisis.

Saat rupiah mulai melemah, portofolio bank sakit tidak mampu menghadapi keadaan yang memburuk.

Dalam keadaan demikian, Keputusan Pemerintah yang telah melikuidasi bank, menunjukkan adanya perubahan sikap Pemerintah tentang doktrin *"too big to fail"*. Doktrin itu memandang bahwa bank sebagai institusi keuangan tidak boleh bangkrut.

Karena eksistensi bank menyangkut masalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk membantu dengan segala cara dan dengan biaya berapa saja untuk menyelamatkan bank yang sedang mengalami kesulitan.

Jadi doktrin "*too big to fail*" telah menjadi dasar bagi pelebagaan penyelamatan bank atau dalam kalangan perbankan internasional dikenal dengan konsep "jaring penyelamat" (*safety net*).

Hal tersebut sebagai jaminan dari Pemerintah untuk membantu mengurangi kerugian yang diderita nasabah penyimpan dana atau nasabah kreditur bank, bila suatu bank yang bersangkutan bangkrut.

Akhir - akhir ini dapat terwujud kesediaan dari bank sentral untuk memberikan kredit likuiditas atau mengambil alih sebagian saham dan manajemen suatu bank. Hanya saja belum sampai pada pembentukan lembaga asuransi deposit, seperti Federal Deposit Insurance Corporation di Amerika Serikat. Dengan demikian, jaring penyelamat akan menimbulkan kepercayaan publik terhadap perbankan karena nasabah dan kreditur bank dapat merasa tenang. Adanya jaminan pemerintah menyebabkan nasabah tidak terburu - buru menarik depositnya dari bank yang sudah bermasalah.

Jika diperhatikan, pelayanan bank di Indonesia tidak hanya bagi para pihak pengusaha besar atau masyarakat berada, tetapi bagi semua lapisan masyarakat. Bank di Indonesia mempunyai tugas membantu Pemerintah dalam pelaksanaan dan bertujuan untuk mensukseskan pembangunan dalam mencapai cita - cita bangsa yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan pemerataan

pelayanan bank sampai ke pelosok desa, perbankan Indonesia menyediakan sarana bank umum dan bank perkreditan rakyat.¹⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, Undang - Undang No.10 Tahun 1998 menentukan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya wajib menggunakan prinsip kehati - hatian. Dengan ditentukannya prinsip kehati - hatian dalam Pasal 2 tersebut, perbankan Indonesia harus melaksanakan hal yang dinyatakan sebagai prinsip kehati - hatian atau *prudential banking*. Maksud diberlakukannya prinsip kehati - hatian supaya bank selalu dalam keadaan sehat sehingga selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati - hatian, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi. Akhirnya, masyarakat bersedia dengan tidak ragu - ragu menyimpan dananya di bank.

Walaupun prinsip kehati - hatian dan rambu - rambu kesehatan bank telah ditentukan agar dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia, masih tetap banyak bank yang tidak dikelola dengan sehat dan melanggar prinsip kehati - hatian, rambu - rambu dan kesehatan bank.

Selanjutnya Pemerintah dan Bank Indonesia menyadari tidak cukup hanya menetapkan prinsip kehati - hatian dan rambu - rambu

15 Djuhendah Hasan. Transparansi Tingkat Kesehatan Bank, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1996.

kesehatan saja. Kemudian, ditetapkan syarat - syarat yang harus dipenuhi seorang yang akan menjadi pemegang saham dan pengurus suatu bank. Syarat - syarat tersebut belum ditetapkan di dalam Undang Undang No.7 Tahun 1992. Sehubungan dengan hal itu, Direksi Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/118/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 di dalam Pasal 2 dijelaskan mengenai kriteria perbuatan tercela.

Dengan melalui surat keputusan tersebut mereka yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan dilarang menjadi pemegang saham bank atau pengurus suatu bank. Selain itu, beroperasinya suatu bank ditentukan juga oleh faktor modal, ini merupakan hal yang sangat vital. Modal bank dapat terdiri dari modal sendiri atau dan modal pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga adalah pihak - pihak yang memperoleh manfaat dana simpanan nasabah. Apabila pihak ketiga menanamkan modal dalam jumlah besar, maka pihak bank dapat beroperasi dengan baik. Penanaman modal oleh para investor sangat membantu kelancaran operasional bank. Makin besar modal disetor oleh para investor, makin sedikit kesulitan yang dialami oleh pihak bank dalam memenuhi tagihan para krediturnya. Dengan penggunaan modal pihak ketiga, dapat diharapkan jalannya perusahaan akan dapat terlaksana dan tentu memperoleh keuntungan.

Sebagai lembaga keuangan, suatu bank dalam hal ini menjual kepercayaan dan jasa untuk memperoleh bunga, komisi atau provisi dari penjualan kredit dan jasa tersebut.¹⁶ Selanjutnya, dengan penggunaan modal pihak ketiga, terdapat kesempatan yang leluasa pada bank untuk memberikan kredit dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dari bunga (*trading on equity*). *Trading on equity* ini mengandung resiko besar karena makin kecil modal sendiri, makin kecil pula *margin of safety*, margin merupakan tulang punggung dari resiko kerugian.¹⁷

Karena ada kaitan antara kepentingan nasabah penyimpan dana dan bank, para penyimpan dana perlu mengetahui jumlah simpanannya di bank dari waktu ke waktu. Hal tersebut antara lain dapat diketahui melalui neraca dan perhitungan laba atau rugi dari bank tersebut. Sebenarnya, kewajiban memenuhi untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang - Undang No.10 Tahun 1998 yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Hal ini diperlukan masyarakat mengingat tingkat kesehatan masing - masing bank. Namun, pelaksanaan kewajiban pernyataan bank tersebut bersifat rahasia dan tidak dapat diketahui oleh umum, sebagai contoh neraca yang diumumkan oleh suatu bank tidak dapat

16 Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial, PT Aksara Persada, 1986, halaman 39.

17 Simorangkir, Op.Cit., halaman 76.

diperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan keuangan suatu bank. Selain itu, masyarakat tidak mengerti untuk membaca neraca suatu bank.

Seperti diuraikan oleh Remy Sjahdeini, neraca yang diumumkan oleh suatu bank hanya terbatas menyangkut keadaan keuangan, sedangkan kesehatan suatu bank tidak hanya dinilai berdasarkan keuangan saja, masih terdapat faktor - faktor lain. Menurut ketentuan Bank Indonesia, penilaian terhadap manajemen suatu bank meliputi 100 (seratus) faktor. Aspek manajemen tersebut tidak terungkap di dalam neraca yang diumumkan oleh bank.¹⁸

Tidak diperolehnya informasi mengenai tingkat kesehatan dan keadaan keuangan yang sesungguhnya dari suatu bank akan mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan apabila ada bank yang dilikuidasi. Hal tersebut terjadi ketika Pemerintah RI mengambil tindakan pencabutan izin usaha terhadap 16 (enam belas) bank pada tanggal 1 November 1997 yang setelah itu disusul pencabutan izin usaha kembali terhadap beberapa bank pada tahun berikutnya.¹⁹

Dalam uraian tersebut diatas, sebenarnya fungsi modal adalah sebagai faktor untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.

18 Remy Sjahdeini, Op.Cit., halaman 9.

19 Ibid.

Fungsi esensial modal bank adalah untuk menjaga agar bank tetap dapat beroperasi sehingga penghasilan bank dapat menutupi kerugian yang diderita. Hal ini semua untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan unsur yang vital untuk menentukan berhasilnya usaha suatu bank. Dengan demikian kepentingan suatu bank memerlukan kepercayaan terhadap masyarakat. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank hilang akan membawa akibat buruk, masyarakat tidak akan menyimpan dananya lagi pada bank. Mengingat bank adalah suatu lembaga kepercayaan, maka eksistensi suatu bank sangat tergantung kepada kepercayaan masyarakat. Makin tinggi kepercayaan masyarakat kepada bank, makin banyak masyarakat menyimpan dana dan menggunakan jasa - jasa bank tersebut.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu dalam keadaan sehat. Dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, Bank Indonesia diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku - buku dan berkas - berkasa yang ada pada bank. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 31 Undang - Undang No.10 Tahun 1998.

Bank sebagai lembaga kepercayaan memberikan keyakinan dalam hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabah penyimpan dana (*fiduciary relationship*). Menurut pendapat Edwar L. Symons, Jr dan James J. White seperti diuraikan oleh Remy Sjahdeini, hubungan antara bank dan nasabah bukanlah hanya sekedar hubungan debitur dan kreditur semata, tetapi lebih dari itu. Transaksi kredit dan penyimpanan dana adalah hubungan debitur dan kreditur. Namun, mengingat suatu bank yang unik di dalam masyarakat kita, bank adalah "*a place of special safety and probity, hubungan tersebut adalah suatu fiduciary*".²⁰

Selanjutnya, Remy Sjahdeini menyatakan bahwa hubungan tersebut memberikan sugesti tentang penetapan kewajiban yang sangat sempit. Istilah tersebut berkonotasi pada suatu janji yang tak bersyarat oleh debitur untuk membayar sejumlah uang yang pasti jumlahnya pada suatu waktu tertentu kepada kreditur yang telah menyediakan uang tersebut. Hal ini lebih lanjut memberikan konotasi tegas, khususnya yang menyangkut penggunaan dana yang dipinjam tersebut. Sebagai contoh yaitu mengenai Deposito bank, dimana bank dapat menggunakan uang tersebut dengan bebas menurut kehendaknya. Namun, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan

20 Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, Op.Cit., halaman 162.

dana tidak semata - mata hubungan debitur dan kreditur saja, tetapi merupakan suatu *fiduciary relationship*.²¹

Remy Sjahdeini menguraikan pendapat Ogilvie dalam bukunya *Canadian Banking Law*. Dia berpendapat serupa dengan Symons, Jr.

Fiduciary Relationship itu menimbulkan *fiduciary obligations*.

Unsur - unsur kunci formulasi dari kewajiban yang disebut *fiduciary obligations*, sebagaimana telah disetujui pengadilan - pengadilan Canada adalah *trust* (kepercayaan), *reliance* (pengandalan) dan *resulting loss* (kerugian). Ogilvie mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan suatu *fiduciary relationships* adalah suatu hubungan bahwa pihak yang satu meletakkan kepercayaan (*confidence or trust*) kepada yang lain sedemikian rupa, sehingga pihak yang satu mengandalkan tindakan dan nasehat yang lain dan dalam melakukan hal yang demikian itu pihak yang bersangkutan berkemungkinan menderita kerugian.²²

Berikut ini unsur kepercayaan akan dikaitkan dengan kedudukan nasabah penyimpan dana dalam perjanjian penyimpanan dana bahwa hubungan antara bank dengan deposan diikat oleh suatu perjanjian pembukaan simpanan deposito. Masalahnya sekarang adalah apakah asas - asas hukum perjanjian berlaku sepenuhnya dalam perjanjian tersebut?. Dengan rumusan lain apakah kedudukan deposan sama atau

21 Ibid.

22 Remy Sjahdeini, Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi Hukum Perbankan Indonesia. Seminar Reformasi Hukum Perbankan, 1997.

seimbang dengan bank dalam perjanjian pembukaan simpanan deposito?.

Sebagaimana diketahui dalam hukum perjanjian berlaku asas kesepakatan (asas konsensualisme).²³ Dengan adanya kesepakatan akan muncul hak dan kewajiban antara para pihak. Lalu, apakah asas ini berlaku sepenuhnya dalam perjanjian pembukaan simpanan nasabah penyimpan dana ataukah asas ini dapat disimpangi?. Untuk itu, perlu disimak hal yang dikemukakan oleh Remy Sjahdeini²⁴, sebagai berikut.

Menurut hemat penulis, sebagai pengaruh dari persepsi pengadilan - pengadilan di manca negara dan kalangan bisnis perbankan internasional bahwa hubungan antara bank dan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur, mempunyai sifat - sifat sebagai hubungan kepercayaan atau *fiduciary relation* yang membebankan kewajiban kepercayaan *fiduciary obligation* kepada bank terhadap nasabahnya, maka masyarakat bisnis dan perbankan Indonesia telah melihat pula hubungan antara bank nasabah adalah hubungan kepercayaan. Di dalam praktek, memang nasabah selalu percaya, apa yang dikemukakan oleh pejabat bank (informasi) sebagai terpercaya kebenarannya dan dapat diandalkan.

23 Perhatikan Pasal 1320 KUHPdata tentang Syarat - syarat sahnya suatu perjanjian, salah satu diantaranya harus ada kata sepakat. Lihat Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, 1976, halaman 30.

24 Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak, Op.Cit., halaman 167.

Dalam Undang - Undang No.10 Tahun 1998, hal ini tidak ditentukan secara jelas. Hanya dalam Pasal 1 butir 5 dinyatakan,

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana... .” Penjelasan Pasal 29 bahwa”... bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan..... ”.

Hal ini berarti hubungan antara nasabah penyimpan dana dan pihak bank dilandasi atas kepercayaan. Sebaliknya, bank mempunyai kewajiban untuk membayarkan kembali simpanan nasabah penyimpan dana tersebut pada saat diperlukan. Undang - Undang No.10 Tahun 1998 mengakui hubungan hukum antara pihak - pihak tersebut adalah hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*).

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa dalam dunia perbankan, hubungan antara bank dan nasabah dilandasi oleh asas kepercayaan. Tepatnya, masyarakat percaya bahwa bank sebagai suatu lembaga yang cukup aman untuk menyimpan dana. Dilihat dari sudut pandang ini kedudukan antara bank dan nasabah penyimpan dana mempunyai posisi yang sama, tetapi dalam praktek dapat dilihat kedudukan bank lebih kuat bila dibandingkan dengan nasabah penyimpan dana.

Hal tersebut dapat diketahui dengan mempelajari syarat - syarat perjanjian pembukaan deposito, yang telah disiapkan oleh bank, deposan hanya mengisi bagian - bagian tertentu saja. Dengan demikian, apakah asas kepercayaan yang melandasi hubungan antara

bank dengan deposan selalu dibuat secara tertulis?. Kenyataan menunjukkan dalam praktek perbankan tidak semua perjanjian antara bank dengan nasabah penyimpan dana tersebut selalu bersifat tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda persetujuannya. Sebagai contoh perjanjian menyimpan deposito berjangka nasabah menandatangani formulir permintaan deposito dan bank menandatangani bilyet deposito atau sertifikat deposito.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (4) dapat diartikan bahwa penyediaan kewajiban memberikan informasi oleh bank kepada nasabah bukan hanya suatu jasa yang opsional sifatnya, tetapi merupakan kewajiban yang harus dilakukan tanpa imbalan dari nasabah. Dalam hal ini pengertian informasi termasuk pemberian nasehat kepada nasabah. Kewajiban bank pemberian informasi dan nasehat itu timbul pada bank karena terjadi transaksi dengan nasabah kemungkinan akan mengalami kerugian yang besar.

Kenyataan dalam praktek, nasabah selalu percaya kepada hal-hal yang berkaitan dengan nasehat oleh pejabat bank sebagai terpercaya kebenarannya dan dapat diandalkan. Bukan hanya sebatas meminta informasi, lebih dari itu meminta nasehat kepada bank mengenai urusan keuangannya. Bahkan, tidak jarang meminta nasehat mengenai bisnisnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih belum memahami hal tersebut sebagai kewajiban pihak bank, walaupun tanpa diminta, harus memberikan informasi dan advis atas

transaksi yang dilakukan melalui bank, dalam hal transaksi mengandung resiko kerugian yang tinggi bagi bank.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut kewajiban bank untuk menyediakan informasi dan advis merupakan realisasi dari *fiduciary obligation*. Pihak nasabah mempunyai hak untuk memperoleh informasi berdasarkan hukum normatif tertulis yaitu Pasal 29 ayat (4) Undang - Undang No.10 Tahun 1998. Ini berarti menjadi kewajiban hukum bagi pihak bank. Apabila mengalami kerugian, nasabah dapat menggugat pihak bank berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, dalam melakukan usahanya bank wajib menempuh cara - cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Hal tersebut telah ditentukan oleh Pasal 29 Ayat (3) Undang - Undang No.10 Tahun 1998.

Dengan demikian, bank memerlukan kepentingan terhadap kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan dananya pada bank atau memanfaatkan jasanya apabila ada jaminan bank mengenai keterangan tentang nasabah penyimpan dana.

Mengingat kepercayaan dari masyarakat terhadap bank dapat timbul apabila bank dalam kegiatan usahanya mampu melindungi kerahasiaan dan keamanan dana masyarakat yang disimpan di bank.

25 Remy Sjahdeini, Ibid. halaman 49.

Berarti pihak bank tidak dapat mengungkapkan keterangan mengenai nasabah penyimpan dana dan simpanannya.

Ketentuan rahasia bank berlandaskan pada falsafah *personal privacy* yaitu milik seseorang harus dipertahankan secara mutlak dapat dilepaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan bank. Hak seseorang dapat dibatasi, dalam hal ini rahasia bank yang pada mulanya dipertahankan secara mutlak apabila kepentingan yang lebih besar menghendaki terpaksa diungkapkan oleh bank.

2.2. RAHASIA BANK MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

2.2.1 Lingkup Rahasia Bank

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bank adalah lembaga perantara dana (*financial intermediary*) dengan tugas pokok menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Bank mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional, yang memerlukan kepercayaan dari masyarakat sehingga dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Kepercayaan dari masyarakat terhadap bank hanya dapat timbul apabila bank dalam kegiatan usahanya mampu melindungi keamanan dana masyarakat yang disimpan di bank.

Modal yang berasal dari pemegang saham merupakan modal yang sifatnya tetap, dalam arti tidak akan ditarik kembali kecuali melalui rapat umum pemegang saham. Dana yang terhimpun dari

masyarakat merupakan tulang punggung suatu bank dalam pengelolaan usahanya.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank terdiri dari dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 dinyatakan, "Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa - jasa dalam lalu lintas pembayaran." Dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan, "Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan dalam bidang tertentu atau memberi perhatian kepada kegiatan tertentu." Penjelasan Pasal 5 ayat (2) menyatakan yang dimaksud dengan "mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu " antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengembangan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan. Selanjutnya, dalam Pasal 5 ayat (2), usaha Bank Umum meliputi hal - hal sebagai berikut :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;

d. membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri ataupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

- (1) surat - surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan perdagangan surat - surat dimaksud,
- (2) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan perdagangan surat - surat dimaksud,
- (3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah,
- (4) sertifikat bank indonesia (sbi),
- (5) obligasi,
- (6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun,
- (7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun,

e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

f. memindahkan dana pada, menjamin dana dari, atau meminjamkan dana bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk cek atau sarana lainnya;

g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanah;
- l. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang - undang ini dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 7 Undang - Undang No.10 Tahun 1998 menyatakan, selain melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 undang - undang yang sama, Bank Umum dapat pula bertindak :

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia,
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,

- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan harus menarik kembali penyertaan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang - undangan pensiun yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas, usaha yang dapat dilakukan oleh lembaga perbankan cukup luas, tetapi dalam hal - hal tertentu Bank Umum dilarang melakukan tindakan - tindakan seperti diuraikan dalam Pasal 10 berikut ini :

- a. penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b dan huruf c,
- b. usaha asuransi, dan
- c. usaha lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 dan 7.

Selain Bank Umum, Undang - Undang No.10 Tahun 1998 juga mengatur tentang Bank Perkreditan Rakyat. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang - Undang No.10 Tahun 1998 yang dimaksud "Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."

Dalam Pasal 13 Undang - Undang No.10 Tahun 1998 ditentukan bahwa usaha yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Selain itu, ditentukan dalam Pasal 14 Bank Perkreditan Rakyat dilarang :

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13.

Baik Bank Umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga simpanan yang diatur oleh Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam Pasal 1 butir (2) ditentukan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bank merupakan wahana penghimpun dana dalam pengertian suatu badan usaha dan yang dihimpun itu adalah dana masyarakat dalam bentuk simpanan.

Dana yang dihimpun tersebut disalurkan kepada masyarakat untuk diusahakan guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Simpanan dana yang dipercayakan oleh para nasabah penyimpan dana kepada bank disimpan oleh bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Bentuk - bentuk simpanan tersebut diatur dalam Pasal 1 butir 6, 7, 8, 9 Undang - Undang No.10 Tahun 1998. Setiap butir pasal tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
- b. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
- c. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

d. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat - alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Bagaimana dasar hukum hubungan bank dengan nasabah penyimpan dana ? Hal ini dapat dilihat dalam literatur hukum perbankan (*banking law*) yang dikemukakan oleh para sarjana, seperti yang dikemukakan oleh, S. Tuwm mengemukakan sebagai berikut :

*The relationship between a banker and his customer is also one of contract. It consists of general contract and special contracts (such as giving advise on investment to the customer) and other duties, e.g. the banker duty of secrecy.*²⁶

Rumusan senada dikemukakan oleh Remy Sjahdeini, "Sekalipun dalam kitab Undang - Undang Hukum Perdata tidak mengatur lembaga khusus tentang simpanan nasabah penyimpan kepada bank (giro, deposito, atau tabungan) atau yang khusus mengatur hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana. Secara umum hubungan hukum mereka sebagai perjanjian pinjam-meminjam, atau lebih spesifik sebagai perjanjian peminjaman uang. Karena hal tersebut merupakan perjanjian pinjam-meminjam, sesuai dengan ketentuan Pasal 1755 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, dana yang disimpan oleh nasabah sebagai milik bank selama dalam penyimpanan bank.

26 S. Tuwm. *Banking Law*, London; Seet&Maxwell, 1970; page 1.

Dengan kata lain, sebelum ditagih oleh nasabah, pihak bank dapat menggunakan dana tersebut untuk kepentingannya seperti layaknya seorang pemilik. Apakah untuk disalurkan sebagai kredit ataupun untuk investasi dan biaya - biaya bank.²⁷

Dengan demikian, pendapat yang dikemukakan tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan antara bank dengan nasabah adalah berdasarkan perjanjian. Arti perjanjian disini adalah suatu peristiwa antara seorang, berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian itu berbentuk suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji / kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁸ Akibat hukum dari peristiwa tersebut para pihak ialah nasabah penyimpan dana dan bank mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam hubungannya dengan hukum perbankan di Indonesia bahwa bentuk perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank tidak dijabarkan apakah sebagai penitipan uang atau pinjam meminjam. Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana dalam praktek, pada umumnya bank menyediakan formulir tersendiri. Dalam formulir tersebut telah tertera persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak bank yang dikenal dengan perjanjian baku.

Akibat hukum dari hubungan yang timbul antara bank dan nasabah penyimpan dana didasarkan pada perjanjian penyimpanan.

27 Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak*, Op.Cit, halaman 154.

28 Lihat R. Subekti, Op.Cit., halaman 1.

Bank berkedudukan sebagai penerima simpanan dan nasabah penyimpan sebagai pemberi simpanan.

Pengertian menyimpan oleh bank menurut Undang - Undang No.10 Tahun 1998 adalah untuk dimanfaatkan oleh bank dalam melakukan kegiatan perbankan. Ini berarti bahwa dana nasabah penyimpan akan dipergunakan atas kepercayaan pemilik dana, kedudukan pihak bank sebagai pihak yang berhutang atau debitur terhadap pemilik dana, sedangkan kreditur adalah pihak nasabah penyimpan dana yang berhak pada waktu tertentu untuk menagih kembali dananya beserta bunga.

Ini berarti penyimpanan dana masyarakat diserahkan penguasaan hak milik atas dananya kepada bank. Nasabah penyimpan dana menyerahkan dananya untuk disimpan oleh bank dengan tujuan untuk dapat dipergunakan atau dimanfaatkan lebih lanjut oleh masyarakat pengguna dana guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Prinsipnya simpanan nasabah tersebut bukan karena paksaan melainkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Nasabah penyimpan dana yang telah menyerahkan dana kepada bank akan memperoleh imbalan bunga untuk jangka waktu tertentu dan pihak bank berkewajiban melaksanakan kepercayaan menyimpan dana nasabah. Kedua belah pihak telah membuat perjanjian simpanan atau perjanjian penyimpanan dana dan perjanjian tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Karena perjanjian tersebut mengandung unsur menyimpan, menitip, memberi kuasa atau kepercayaan (*fiduciary relationship*) dan unsur meminjam, yang berarti perjanjian yang mempunyai khas tersendiri.²⁹ Hubungan hukum yang terjadi antara bank dan nasabah penyimpan dana berdasarkan perjanjian penyimpanan. Bank berkedudukan penerima simpanan dan nasabah penyimpan dana sebagai pemberi kepercayaan. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan kepada lembaga perbankan tidak boleh disalahgunakan.

Untuk mengetahui lingkup rahasia bank dan pengecualiannya, terlebih dahulu diperhatikan dasar hukum ketentuan rahasia bank di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Rahasia bank dirumuskan dalam pasal 1 butir 28, yaitu "Menurut ketentuan pasal tersebut, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya". Selain itu, Pasal 40 ayat (1) memberikan ketentuan, "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A.

Untuk mengetahui latar belakang pembuat undang-undang mengenai rahasia bank dapat dilihat penjelasan dari pasal tersebut.

29 Emmy Pangaribuan, Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Bank Terhadap Keamanan Simpanan Nasabah, halaman 5.

Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) dikemukakan, “Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank. Bank-bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank selaku kustodian dan /atau wali amanat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan pasar modal”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 secara eksplisit memberikan pengecualian dalam tujuh hal. Ketujuh pengecualian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. untuk kepentingan perpajakan kepada pejabat pajak (Pasal 41);
- b. untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara (Pasal 41A);
- c. untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana korupsi kepada polisi, jaksa atau hakim (Pasal 42);
- d. dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya (Pasal 43);
- e. dalam tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44);
- f. atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A ayat 1);

- g. dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan (Paal 44A ayat (2));

Pengecualian tersebut di atas masih dibatasi dengan persyaratan tertentu meliputi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- a. Untuk kepentingan perpajakan, keterangan tersebut hanya dapat dilakukan oleh bank setelah adanya perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan dengan menyebutkan nama pejabat pajak dan nasabah wajib pajak yang diperlukan keterangannya..
- b. Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara, keterangan tersebut hanya dapat dilakukan oleh bank setelah Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin secara tertulis dengan menyatakan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara dan nasabah debitur serta alasan diperlukannya keterangan tersebut.
- c. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, keterangan hanya dapat dilakukan oleh Bank setelah Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin secara tertulis atas permintaan tertulis dari kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Permintaan tersebut harus menyatakan

nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan tersebut.

- d. Dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya di pengadilan, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.
- e. Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Tukar menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank. Tujuannya antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank lain. Dengan demikian, bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau bank lain.
- f. Untuk kepentingan nasabah penyimpan atas permintaan, persetujuan atau kuasanya secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpanan tersebut.

- g. Untuk kepentingan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan.

Pengecualian terhadap rahasia bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 terbatas pada pengecualian yang diberikan berdasarkan Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A, sepanjang tidak diberikan pengecualian oleh undang-undang lain. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, misalnya peraturan pemerintah, tidak dapat memberikan tambahan pengecualian, tetapi hanya mengatur ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Pengecualian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bersifat limitatif, maka sekalipun Pimpinan Bank Indonesia telah diberi kewenangan untuk memberikan izin pengecualian, hanya terbatas terhadap pengecualian yang telah ditentukan oleh Pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 42 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Ini berarti Pimpinan Bank Indonesia hanya mempunyai kewenangan untuk memberikan pengecualian berupa perintah tertulis kepada petugas pajak untuk kepentingan perpajakan, kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara untuk penyelesaian piutang bank dan kepada polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

Ketentuan rahasia bank berlaku terhadap pejabat pajak tergantung atas kapasitas bank pada saat suatu bank menghadapi pejabat pajak tersebut. Dalam hal ini bank sebagai pihak ketiga yang merupakan bank dari nasabah penyimpan yang menjadi wajib pajak atau bank sebagai wajib pajak. Pengecualian pertama yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 kepada bank untuk mengungkapkan hal yang harus dirahasiakan untuk kepentingan perpajakan kepada pejabat pajak. Untuk itu, pejabat pajak dapat memperoleh keterangan dari bank dan melihat bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keterangan simpanan dan nasabah penyimpan. Hal tersebut berdasarkan permintaan Menteri Keuangan kepada Pimpinan Bank Indonesia untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat pajak yang ditujukan kepada suatu bank tertentu.

Menurut ketentuan Pasal 41 ayat (1), bank bukan hanya sebagai yang berhak, melainkan sebagai pihak yang diwajibkan untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan kepada pejabat pajak yang telah membawa perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia kepada bank tersebut. Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 41 ayat (2), dalam perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia harus dinyatakan nama pejabat pajak dan nama wajib pajak yang dikehendaki keterangannya. Ini berarti dipastikan kepada

setiap pengurus atau pegawai bank jika didatangi oleh seorang pejabat pajak yang akan meminta keterangan mengenai simpanan dan nasabah penyimpan, bank wajib memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat diperlukan. Pengurus atau pegawai bank harus menolak permintaan pejabat pajak apabila dalam perintah tertulis tidak dinyatakan nama pejabat pajak apabila dalam perintah tertulis tidak dinyatakan nama pejabat pajak yang ditunjuk dan nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya. Hal tersebut untuk menghindarkan sanksi pidana yang kemungkinan dikenakan Undang-Undang Perbankan kepada pihak yang melanggar rahasia bank.

Pengecualian kedua yang ditentukan dalam Pasal 41 A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Menurut ketentuan tersebut, Pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara hanya dapat memperoleh keterangan dari bank mengenai nasabah debitur tersebut, apabila telah mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan Bank Indoensia. Permohonan untuk memperoleh izin harus diajukan secara tertulis oleh Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (Pasal 41 A ayat 2). Menurut ketentuan tersebut, permintaan sebagaimana dimaksud di atas harus diajukan dengan menyatakan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara, serta nama nasabah debitur dan alasan diperlukannya.

Pengecualian ketiga ditentukan dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam ketentuan pasal tersebut, dinyatakan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pasal 42 ayat (1) menentukan polisi, jaksa, hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang tersangka/terdakwa yang menjadi nasabah penyimpan, terlebih dahulu telah mendapat izin tersebut, menurut Pasal 42 ayat (2), harus diajukan secara tertulis oleh Kepala kepolisian Republik Indonesia (jika keterangan tersebut diperlukan oleh Polisi), diajukan oleh Jaksa Agung (jika diperlukan jaksa) atau oleh Mahkamah Agung (jika diperlukan oleh hakim). Pasal 42 ayat (3) ditentukan permintaan tersebut diajukan dengan menyatakan nama jabatan polisi, jaksa atau hakim yang bersangkutan, tersangka/terdakwa, alasan diperlukannya keterangan tersebut. Apabila ketentuan-ketentuan itu tidak dipenuhi, pengurus atau pegawai bank dapat menolak permintaan tersebut.

Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengharuskan hakim, dalam perkara pidana mendapat izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia, mengajukan permintaan tertulis untuk keperluan memperoleh izin tersebut, melalui ketua Mahkamah Agung. Hal tersebut tidak tepat dari sudut pandang hukum jika dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Ternyata untuk kepentingan

peradilan dalam perkara pidana, menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, hakim harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Pimpinan Bank Indonesia, sebelum memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan terdakwa yang tercatat pada bank.

2.2.2 Pihak-pihak yang berkewajiban Merahasiakan

A. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pegawai Bank

Menurut ketentuan Pasa 47 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pihak-pihak yang berkewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya meliputi : anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya dari bank.

Berdasarkan penjelasan Pasal 40 dapat ditafsirkan dari kalimat “Kerahasiaan itu diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank”. Hal tersebut dimaksudkan menjaga kerahasiaan nasabah penyimpan dana karena masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya kepada bank apabila pihak bank memberikan jaminan terhadap keterangan mengenai simpanan tersebut tidak boleh disalahgunakan.

Nasabah bank harus dirahasiakan menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) dapat disimpulkan dari kalimat “Keterangan mengenai

nasabah penyimpan dan simpanannya”. Adapun rumusan Pasal 1 ayat (28) dinyatakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dana dan simpanannya. Apabila dibandingkan antara rumusan Pasal 1 ayat (28) dan Pasal 40 ayat (1) berarti telah terdapat kesesuaian mengenai ruang lingkup dari rahasia bank.

Untuk mengetahui pemikiran pembentuk undang-undang mengenai pasal tersebut, perlu diperhatikan penjelasan Pasal 40 ayat (1) dinyatakan, “Apabila nasabah bank merupakan nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Apabila keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank”.

Berdasarkan ketentuan ruang lingkup rahasia bank apabila terdapat pihak-pihak yang membocorkan rahasia bank seperti yang ditentukan Pasal 40, termasuk identitas nasabah, seperti nama, alamat dan nomor rekening penyimpanan pada suatu bank, maka telah ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dinyatakan apabila anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama

empat tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi unsur-unsur delik (tindak pidana) rahasia bank, jika dihubungkan antara Pasal 40 dengan Paal 47 ayat (2) yang merupakan unsur-unsur tindak pidana rahasia bank sebagai berikut :

- (1) Pelakunya adalah anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya.
- (2) Unsur kesalahannya adalah kesengajaan.
- (3) Perbuatan yang dilarang adalah memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A.
- (4) Keterangan yang diberikan tersebut menyangkut nasabah penyimpan dan simpanannya.
- (5) Nasabah tersebut dapat berupa orang atau badan usaha.

Tindak pidana rahasia bank menurut Pasal 51 adalah tindak pidana kejahatan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 47 ayat (2) mengenai sanksi tindak pidana rahasia bank ditentukan penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Selanjutnya, nasabah penyimpan dana yang dirugikan karena dibocorkan oleh anggota direksi, dewan komisaris,

pegawai bank dan pihak terafiliasi dapat menuntut ganti kerugian kepada bank yang bersangkutan. Ini berarti nasabah yang merasa dirugikan tetap mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian dari bank yang membocorkan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya melalui proses gugat – ginugat (litigasi) di pengadilan perdata.

Menurut Remy Sjahdeini, yang menjadi dasar hukum tuntutan ganti kerugian kepada bank sebagai berikut :

- (1) Terjadinya hubungan hukum antara bank dan nasabah adalah *fiduciary relation* (hubungan kepercayaan). Hubungan hukum tersebut diakui secara luas oleh putusan pengadilan di banyak negara. Sebagai suatu *fiduciary relation*, bank mempunyai suatu duty of fiduciary terhadap nasabah. Berdasarkan asas pada umumnya dalam suatu *duty of fiduciary*, jika pihak yang mengemban kepercayaan ternyata mengungkapkan kepada pihak lainnya, terhadap perbuatannya itu dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.³⁰
- (2) Nasabah penyimpan yang dirugikan dapat menggugat pihak bank berdasarkan perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut berkaitan dengan

³⁰ Remy Sjahdeini, Op. Cit, halaman 34.

pengungkapan rahasia bank seperti dinyatakan dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

B. Mantan Anggota Direski, Komisaris dan Pegawai bank

Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang dapat dikategorikan sebagai pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank. Hal ini berarti ketentuan rahasia bank berlaku bagi semua pejabat dan karyawan bank walaupun pegawai bank tersebut tidak semua mempunyai hubungan dengan penyimpanan dana dan simpanannya, sebagai contoh para pelayan, satpam dan pengemudi kendaraan dan sebagainya. Apabila diperhatikan, tidak selamanya seorang pegawai bank bekerja pada suatu bank tertentu karena suatu ketika pihak yang bersangkutan akan menjalani masa pensiun atau berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan oleh lembaga tempat mereka bekerja.

Selanjutnya, akan timbul pertanyaan apakah mantan pegawai bank yang bersangkutan masih tetap memegang kewajiban rahasia bank seperti ketika mereka masih aktif bekerja? Di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tidak diatur ketentuan mantan anggota direksi, dewan komisaris dan pegawai bank masih diharuskan memegang rahasia bank. Sebaliknya, jika masih aktif bekerja diwajibkan memegang ketentuan rahasia bank, seperti diatur dalam Pasal 47 ayat (2) dinyatakan, "Anggota dewan komisaris, direksi,

pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Apabila terdapat pihak yang memaksa bank dan pihak terafiliasi untuk membuka rahasia bank akan terkena sanksi yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) sebagai berikut. “Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Sebagaimana diketahui direksi sebagai salah satu seorang pimpinan bank yang mengetahui seluruh aktivitas bank yang bersangkutan termasuk nasabah penyimpan dan simpanannya sehingga seluk beluk mengenai bank dan patra nasabahnya diketahui oleh direksi, sudah tentu direksi diwajibkan memegang teguh rahasia bank. Sehubungan dengan hal tersebut, mantan direksi bank masih tetap diwajibkan memegang rahasia bank sebagai kewajiban moral

(*moral obligation*) walaupun tidak aktif lagi bekerja karena mereka mengetahui aktivitas bank dan para nasabah penyimpan. Seandainya mantan pejabat dan karyawan melanggar rahasia bank tersebut. Apabila pihak yang dirugikan tidak melakukan penuntutan, hal tersebut tidak lagi menjadi kewajiban rahasia bank. Jika terjadi sebaliknya, dapat dikategorikan melanggar Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sehingga sanksi yang diberikan tergantung dengan penuntutan ganti kerugian atau dalam bentuk lain.

Bagi mantan pejabat dan pegawai bank jika dikaitkan dengan sumpah jabatan, bukan lagi meliputi lingkup rahasia bank, tetapi kewajiban moral. Untuk itu, pejabat dan pegawai yang tidak aktif lagi bekerja bagi mereka tidak terikat lagi dengan sumpah jabatan. Apabila mereka membuka rahasia bank, akan timbul akibat yang mempengaruhi kredibilitas bank tertentu. Dalam hal ini kebocoran rahasia bank tersebut dapat mengakibatkan masyarakat tidak percaya lagi dengan bank tersebut atau timbul kerugian bagi nasabah tertentu sehingga terhadap pihak yang membocorkan dapat dikenakan sanksi berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

C. Pemegang Saham

Para pemegang saham bank adalah pemilik bank dan sebagai pengurus bank. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

ditentukan para pemegang saham bank sebagai pihak terafiliasi dari bank yang berkewajiban memegang rahasia bank. Ini berarti mereka sebagai pemilik dan pengurus bank dapat memperoleh keterangan dari pihak bank mengenai nasabah penyimpan dana. Menurut Pasal 47 ayat 2 jo. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (22), para pemegang saham bank yang menurut penilaian Bank Indonesia sebagai salah satu pihak yang turut serta mempengaruhi pengelolaan suatu bank. Dalam hal ini mereka terlibat sebagai pihak terafiliasi bagi suatu bank dan berlaku kewajiban untuk merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan rahasia bank. Ini berarti, menurut penilaian Bank Indonesia para pemegang saham turut serta mempengaruhi dalam pengelolaan bank sehingga pemegang saham bank dapat mengetahui secara rinci nasabah penyimpan dan simpanannya. Menurut ketentuan Anggaran Dasar Bank, Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai kekuasaan untuk meminta kepada direksi atau dewan komisaris bank yang bersangkutan agar mengungkapkan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Semua keterangan yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya bersifat rahasia dan tidak dapat diungkapkan oleh para pemegang saham bank tersebut kepada pihak lain. Hal itu berarti pemegang saham bank sebagai pihak yang mempunyai kewajiban memegang teguh rahasia bank.

D. Pihak Pemberi Jasa Bagi Bank

Seperti diuraikan dalam Pasal 1 ayat (22), salah satu pihak terafiliasi diantaranya pihak yang memberikan jasanya kepada bank yang meliputi akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya. Sebagai contoh, pernyataan pendapat akuntan publik mengenai wajar atau tidaknya suatu laporan keuangan untuk menentukan tingkat kepercayaan dari pembaca atas data yang disajikan dalam laporan keuangan, dalam hal ini perusahaan sebagai nasabah penyimpan dana.³¹ Ini berarti sebelum pernyataan diberikan oleh akuntan publik telah diketahuinya mengenai simpanan nasabah penyimpan sebagai suatu perusahaan. Akuntan publik yang ditunjuk oleh Badan Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal melakukan pemeriksaan atas simpanan nasabah penyimpan yang terdapat pada bank-bank tertentu. Selain itu, ketentuan Pasal 31 dan Pasal 31A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu jika diperlukan. Hal ini berarti bahwa Bank Indonesia dapat menugasi akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank. Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) bahwa laporan pemeriksaan bank

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A bersifat rahasia. Dengan demikian akuntan tidak berwenang untuk mengumumkan hasil audit kepada masyarakat. Akuntan pun tidak berwenang untuk menilai hasil auditnya benar atau salah.

Berikutnya peranan konsultan hukum diperlukan jika terdapat masalah sengketa hukum atau harus diselesaikan di Pengadilan. Peranan konsultan hukum sangat menentukan dalam kegiatan Pasar Modal karena konsultan hukum sebagai lembaga penunjang Pasar Modal.³² Peranan tersebut diperlukan dalam rangka mempersiapkan emisi saham dan obligasinya diantaranya meneliti dokumen-dokumen yang melindungi harta kekayaan perusahaan termasuk dana nasabah penyimpanan. Sebagai contoh, kerja sama perolehan pinjaman, perdagangan, royalti, dan termasuk perjanjian antara perusahaan dengan lembaga perbankan.

Pihak terafiliasi berikutnya adalah penilai, berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang pasar modal telah menuntut peranan perusahaan penilai yang makin lama makin menonjol manfaatnya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jasa penilai diperlukan dalam lingkup kepentingan yang luas. Penilaian yang dilakukan tidak saja terhadap aktiva tetap, tetapi aktiva tidak tetap. Penilai sebagai suatu keahlian yang bersifat bebas dan obyektif jasanya

31 Sumartono. Pengantar tentang Pasar Modal di Indonesia. Ghalia Indonesia, halaman 100.

32 M. Zen Umar Purba. Bahan Kuliah Ilmu Hukum Pasca Sarjana, Tahun 1997

banyak diminta oleh berbagai perusahaan.³³ Perusahaan yang akan melakukan penilaian kembali atas kekayaannya, termasuk kenaikan nilai kekayaan perusahaan tersebut, seperti nilai simpanan perusahaan pada suatu bank tertentu.

E. Keluarga pengelola Bank

Dalam Pasal 1 ayat 22d pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi bank adalah pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, pengawas, direksi dan pengurus termasuk sebagai pihak terafiliasi untuk memegang teguh rahasia bank. Rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat walaupun tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan.

Keluarga pengelola bank termasuk pihak terafiliasi karena keluarga sebagai pihak yang terdekat dalam berkomunikasi, kemungkinan terjadi kebocoran informasi mengenai rahasia bank termasuk nama dan alamat nasabah. Apabila hal itu terjadi, yang bersangkutan akan terkena sanksi seperti ditentukan dalam Pasal 50 sebagai berikut. Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan

33 Sumantoro, Op. Cit., halaman 104.

peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tidak kurang dari delapan tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Selain itu, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif seperti dinyatakan dalam Pasal 52 ayat (1) bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif seperti denda dan pencabutan izin usaha kepada bank tertentu yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tidak menerangkan secara tegas yang dimaksud dengan nasabah, tetapi dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) dinyatakan :
“..... yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.....”
Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Perbankan dinyatakan bank tidak boleh

memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Dalam penjelasan Pasal 36 Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tidak dinyatakan secara jelas yang dimaksud dengan nasabah bank. Hal ini dapat diketahui dari Surat Menteri Keuangan No. R-25/MK/IV/1969 tanggal 24 Juli 1969 yang memberikan penjelasan berikut.

- (1) Keadaan keuangan yang tercatat padanya, ialah keadaan mengenai keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos-pos pasiva dan pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam pelbagai bentuk kepada yang bersangkutan.
- (2) Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan ialah segala keterangan tentang orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan dan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 antara lain :
 - a. pemberian pelayanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri,
 - b. mendiskontokan dan jual beli surat-surat berharga, dan
 - c. pemberian kredit.

Ketentuan tentang rahasia bank tersebut di atas tidak menghalangi kelaziman tukar-menukar informasi antarbank sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No. 14 Tahun 1967. Dengan demikian ketentuan rahasia bank tersebut berlaku baik bagi nasabah penyimpan dana maupun bagi nasabah pengguna dana.

Pada dasarnya pengertian rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 sama dengan pengertian dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, tetapi dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 perihal rahasia bank diatur dalam Bab VII dengan judul "Ketentuan-ketentuan lain", sedangkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diatur dalam Bab VII dengan judul "Rahasia Bank". Dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 rumusan rahasia bank menggunakan kata "harus" dan pada akhir kalimat dicantumkan pengecualian yang bersifat umum berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, tanpa menyebut pasal yang terkait. Menurut Pasal 40 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 rumusan rahasia bank dengan menggunakan kata "wajib" dan pada akhir kalimat dicantumkan secara sepsifik dengan dinyatakan pasal-pasal terkait.

Pada awalnya rahasia bank secara khusus diatur di dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu terdapat pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Prp. Tahun 1960

tanggal 9 Juni 1960 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 23 Prp. Tahun 1960 tentang "Rahasia Bank". Undang-Undang No. 23 Prp Tahun 1960 dalam Pasal 2 ditentukan, bank tidak boleh memberikan keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan. Diuraikan dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang tersebut yang dimaksud langganan bank adalah orang-orang yang mempercayakan uangnya pada bank, menerima cek, bunga dari bank dan lain sebagainya. Itu berarti bahwa semua orang yang menerima, membayar, atau menitipkan uang mereka pada bank sebagai akibat dari pelaksanaan tugas sehari-hari. Pengecualian dari ketentuan rahasia bank menurut Undang-Undang No. 23 Prp. Tahun 1960 di atas diatur dalam Pasal 3 meliputi :

- a. kepentingan perpajakan, dan
- b. kepentingan peradilan dalam perkara pidana

Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank tersebut diancam dengan sanksi pidana.

Selanjutnya, apabila Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 dibandingkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 terdapat beberapa perbedaan pengaturan rahasia bank sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tidak mengatur masalah berlakunya rahasia bank untuk pihak terafiliasi, sebaliknya

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 mengatur ketentuan rahasia bank berlaku bagi pihak terafilias (Pasal 40 ayat (2)).

- (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 mengatur 3 macam pengecualian yaitu untuk kepentingan perpajakan (Pasal 37 ayat (1)) untuk kepentingan perkara pidana (Pasal 37 ayat (2)) dan untuk kepentingan informasi antar bank (Penjelasan Pasal 37). Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diatur 4 macam pengecualian yaitu untuk kepentingan perpajakan, pengusutan perkara pidana, dalam perkara perdata antar bank dan nasabahnya di pengadilan dan tukar menukar informasi antar bank.
- (3) Pengecualian rahasia bank untuk perkara pidana tidak diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 kemungkinan pihak kepolisian meminta keterangan yang bersifat rahasia, sedangkan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 hal tersebut diatur secara rinci.
- (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 anggota direksi dan pegawai bank yang menolak memberikan keterangan yang wajib diberikan kepada jaksa atau hakim atau pejabat pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan diancam dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, sanksi pidana untuk pelanggaran ketentuan rahasia

bank lebih berat dibandingkan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967.

Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 pada umumnya diklarifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang memandang perlu memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelanggar ketentuan rahasia bank, yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- b. Pasal 47 ayat (2) dinyatakan bahwa anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun paling lama empat tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
- c. Pasal 47 A dinyatakan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan

Pasal 44 A diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama tujuh tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Undang-Undang Perbankan yang mengatur rahasia bank sebelum berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 banyak kelemahan seperti ruang lingkup rahasia bank selain nasabah penyimpan dana suatu bank berlaku juga bagi nasabah debitur bank yang meliputi nasabah debitur kredit macet maupun nasabah yang menggunakan jasa bank lain seperti kiriman uang, pembukaan *Letter of Credit* (L/C), garansi bank dan lain-lain. Seperti diuraikan oleh Remy Sjahdeini belum terdapat persepsi yang sama mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah yang harus dirahasiakan. Seperti contoh, dengan mengemukakan atau membenarkan suatu perusahaan adalah nasabah debitur suatu bank tanpa menyetakan jumlah uang apakah termasuk hal yang harus dirahasiakan ? Bagaimana pul adengan publisitas perolehan kredit sindikasi suatu perusahaan ? Bagaimana berlakunya trahasia bank terhadap pihak-pihak yang akan melakukan merger dengan bank atau akuisisi bank, karena pelanggaran rahasia bank termasuk pelanggaran pidana, pengungkapan keadaan keuangan nasabah kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan persetujuan

nasabah yang bersangkutan tidak terdapat pengaturan apakah termasuk pelanggaran rahasia bank.³⁴

Karena ketentuan rahasia bank yang selama ini tertutup, dapat digunakan untuk menutupi kecurangan yang dilakukan pihak tertentu perlu ditinjau ulang. hanya hal-hal yang berkaitan dengan keterangan mengenai simpanan dan nasabah penyimpan saja yang merupakan rahasia bank. Selain itu, untuk kegiatan penyaluran dana masyarakat oleh bank bukan lagi merupakan rahasia bank.

Dengan telah memberlakukan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu mengubah beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Seperti diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank yang selama ini sangat tertutup telah mengalami perubahan. rahasia bank dimaksud sebagai lembaga kepercayaan yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan. Karena kelemahan-kelemahan pengaturan rahasia bank selama ini, perlunya penerapan rahasia bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

34 Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, halaman 33.

2.3. KEPENTINGAN UMUM DAN KEPENTINGAN BANK VERSUS KEPENTINGAN NASABAH

2.3.1. Kepentingan Umum Versus Kepentingan Nasabah

Berdasarkan ketentuan-ketentuan rahasia bank yang telah dibahas sebelumnya, dapat diketahui bahwa rahasia bank tidak bersifat mutlak karena dalam keadaan tertentu dan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu rahasia bank dapat dibuka oleh pihak bank tanpa dianggap melanggar ketentuan rahasia bank. Hal tersebut didasarkan dengan pengecualian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/82/Kep/Dir Tanggal 31 Desember 1998, dan ini dinyatakan tidak berlaku lagi karena telah diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor.2/19/PBI/2000, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pengecualian rahasia bank yang ditentukan Pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 42 bahwa Pimpinan Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada bank untuk kepentingan perpajakan, urusan piutang dan lelang negara, dan memberi izin tertulis kepada polisi, jaksa atau bahkan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana agar bank mengungkapkan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain kepentingan-kepentingan tersebut Pimpinan Bank Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan bank memberikan keterangan dan

menyampaikan dokumen-dokumen selain yang dikecualikan oleh Undang-Undang Perbankan.

Apabila pengungkapan rahasia bank yang berkaitan dengan rekening dan simpanan nasabah apabila tanpa izin Pimpinan Bank Indonesia, atau nasabah penyimpan, hal tersebut berarti melanggar Undang-Undang Perbankan yang berlaku. Akibatnya akan berdampak merusak kredibilitas perbankan nasional dan mengakibatkan kontra produktif di tengah upaya memulihkan citra perbankan nasional dari krisis kepercayaan masyarakat.³⁵

Secara universal hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari berbagai jenis tindak kriminal baik yang berwujud kejahatan maupun pelanggaran. Hukum Pidana bertujuan melindungi kepentingan umum. pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 untuk kepentingan umum dan kepentingan bank walaupun hal tersebut bertentangan dengan kepentingan nasabah penyimpan dana. Namun, pengecualian terhadap rahasia bank untuk kepentingan umum wajib melalui prosedur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin atau Perintah Membuka Rahasia Bank, prosedur pemberian izin oleh Pimpinan Bank Indonesia ditentukan dalam beberapa pasal. Dalam Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia tersebut dinyatakan hal berikut :

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan

memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan kepada pejabat pajak.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Menteri Keuangan dengan mencantumkan :

- a. nama dan jabatan pejabat pajak;
- b. nama nasabah penyimpan dana sebagai wajib pajak yang dikehendaki keterangannya;
- c. nama kantor bank tempat nasabah mempunyai simpanan;
- d. keterangan yang diminta ; dan
- e. alasan diperlukannya keterangan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 5 Surat Keputusan tersebut menguraikan selain melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas, Pimpinan Bank Indonesia melakukan tindakan sebagai berikut.

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat tersebut untuk memperoleh keterangan dari bank yang bersangkutan, mengenai simpanan nasabah debitur.
- (2) Izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis berdasarkan permintaan tertulis

dari Badan Urusan Piutang dan lelang Negara/Katua Panitia Urusan Piutang Lelang Negara.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mencantumkan :

- a. nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang dan Lelang negara;
- b. nama nasabah debitur yang mempunyai simpanan;
- c. nama kantor bank tempat nasabah debitur mempunyai simpanan;
- d. keterangan yang diminta;
- e. alasan diperlukannya keterangan.

Selain itu, ketentuan Pasal 6 menguraikan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis berdasarkan permintaan tertulis dari Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Ketua Mahkamah Agung.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mencantumkan :

- a. Nama, pangkat, NRP/NIP dan jabatan jaksa, polisi atau hakim;
- b. Nama tersangka/terdakwa yang mempunyai simpanan;
- c. Nama kantor bank tempat tersangka/terdakwa mempunyai simpanan;
- d. Keterangan yang diminta;
- e. Maksud pemeriksaan atau alasan diperlukannya keterangan ;
- f. Hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Permintaan izin untuk membuka rahasia bank tersebut ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tersebut ditujukan kepada Pimpinan Bank Indonesia agar diperhatikan Urusan Hukum Bank Indonesia Gedung Tipikal Lantai 10 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10010.

Penandatanganan surat permintaan izin membuka rahasia bank ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) harus ditandatangani oleh Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan, Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara untuk menyelesaikan piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara, sedangkan Jaksa Agung, Kepala

Kepolisian Republik Indonesia, atau Ketua Mahkamah Agung untuk kepentingan peradilan pidana. Penandatanganan permintaan tersebut dengan membubuhkan tanda tangan basah.

Berdasarkan permintaan izin untuk membuka rahasia bank dalam Pasal 8 (1), dinyatakan Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin atau perintah untuk membuka rahasia bank harus dilakukan selambat-lambatnya empat belas hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap. Apabila permintaan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) menentukan Pimpinan Bank Indonesia dapat menolak untuk memberikan izin untuk membuka rahasia bank. Penolakan oleh Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus dilakukan selambat-lambatnya empat belas hari setelah permintaan diterima secara lengkap. Dengan demikian, surat penolakan untuk memberikan izin atau pemberian untuk membuka izin harus ditandatangani oleh Pimpinan Bank Indonesia dalam hal ini Gubernur Bank Indonesia atau pengganti Gubernur Bank Indonesia dalam hal berhalangan.

Berkaitan dengan uraian di atas, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Tindakan membocorkan rahasia bank, ditetapkan sebagai tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara dan denda

yang berat. Tujuannya supaya terbentuk ketaatan terhadap ketentuan rahasia bank. Kewajiban menjaga rahasia bank diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank, apabila ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan tidak akan disalahgunakan.

Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pada umumnya diklarifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan. Pembentuk undang-undang dalam hal ini memandang perlu memberikan sanksi yang cukup berat pelanggar ketentuan rahasia bank, yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 47 ayat (1) menetapkan bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- b. Pasal 47 ayat (2) menetapkan bahwa anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan

sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, menurut Pasal 40 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- c. Pasal 47 A menetapkan bahwa anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya, ternyata perlindungan rahasia bank di Indonesia termasuk ketentuan yang ketat dengan pengecualian yang limitit. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ditentukan bahwa pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran pidana (*criminal Violation* atau *criminal offence*). Khusus untuk pengecualian yang ditentukan dalam Pasal 43, yaitu dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dan Pasal 44 yaitu dalam rangka tukar menukar informasi antar bank serta Pasal 44 A yaitu atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan berikut ahli warisnya, bank tidak memerlukan izin dari siapapun. Namun, kenyataannya penyimpanan dana pada bank

bersifat dilematis, di satu pihak rahasia bank diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat untuk menjamin kelangsungan usaha bank, di lain pihak dapat digunakan sebagai alasan oleh pihak – pihak tertentu yang beritikad tidak baik. Sebagai contoh memanfaatkan rekening untuk menampung dana ilegal. Pada saat rekening akan diperiksa nasabah yang bersangkutan keberatan dengan dalih ketentuan rahasia bank.

Beberapa perbedaan selalu menjadi legal issue mengenai apakah yang perlu dilindungi hanya kepentingan nasabah yang bersangkutan secara individual, ataukah terkait juga kepentingan-kepentingan bank serta kepentingan masyarakat umum berkaitan dengan berlakunya ketentuan rahasia bank di masing-masing negara. Selain itu, yang menjadi legal issue sampai sejauh mana kepentingan nasabah yang bersangkutan wajib dilindungi dalam hal perlunya diungkapkan keterangan mengenai simpanan dan nasabah penyimpan serta transaksi nasabah dengan bank yang bersangkutan. Apabila terjadi benturan –benturan antara kepentingan nasabah dan kepentingan umum, serta benturan antara kepentingan nasabah dan kepentingan bank, hal-haltersebut telah diatur dalam ketentuan yang menyangkut pengecualian atas kewajiban bank untuk memegang teguh rahasia bank.³⁶

36 Remy Syahdeini, *Op. Cit.*, halaman 4.

Perkembangan keadaan politik dalam negeri, keadaan sosial, terutama menyangkut timbulnya kejahatan-kejahatan di bidang *money laundering*, dan kebutuhan akan adanya stabilitas ekonomi, terutama stabilitas moneter. Hal tersebut telah menimbulkan kebutuhan akan perlunya pelonggaran terhadap kewajiban rahasia bank apabila kepentingan bangsa dan masyarakat umum didahulukan daripada kepentingan nasabah bank. Sebaliknya, dalam hal-hal tertentu untuk kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat umum kewajiban rahasia bank diperketat, dengan alasan pertimbangan demi berhasilnya pengerahan tabungan masyarakat oleh perbankan dan terjaminnya stabilitas moneter yang dapat terganggu jika kepercayaan masyarakat terhadap perbankan runtuh.³⁷ Selanjutnya, bagaimana halnya dengan tugas pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia yang memerlukan rincian mengenai “nasabah penyimpan dan simpanannya”, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut ketentuan rahasia bank dalam dunia perbankan kepada Bank Indoensia, tidak disebutkan secara eksplisit merupakan pengecualian, tetapi secara implisit pengungkapan keterangan tersebut kepada Bank Indonesia merupakan pengecualian.

Apabila diperhatikan, Bank Indoensia dapat memperoleh informasi dari bank mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan. Hal ini dimaksudkan supaya dapat dilakukan pembinaan dan

37 Ibid, halaman 11.

pengawasan sebagaimana fungsi tersebut ditetapkan oleh Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Berikutnya pengungkapan keterangan oleh suatu bank kepada Bank Indonesia merupakan kewajiban hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Bank Indonesia dan bank wajib memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia untuk memeriksa buku-buku dan berkas-berkas bank.

Pembentukan undang-undang memandang perlu menetapkan ketentuan berkaitan dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia seperti dinyatakan sebagai berikut.

- a. 1 30 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menetapkan bahwa bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usaha menurut tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia.
- b. Pasal 30 ayat (2) menetapkan bahwa bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh

kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan tersebut, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Atas permintaan Bank Indonesia, bank berkewajiban memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan tentang kesehatan bank tidak diumumkan dan bersifat rahasia. Kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan usaha suatu bank kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan dari suatu bank. Pemantauan terhadap keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan.

Apabila bank melakukan pelanggaran terhadap kewajiban untuk memnuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana ? Sanksi administratif seperti denda dan pencabutan izin usaha dapat juga dikenakan oleh Bank Indonesia kepada bank yang

bersangkutan. Selain itu, direksi bank yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana penjara yang sangat berat seperti ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) bahwa anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan hal-hal berikut.

(1) Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.

(2) Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tiga tahun dan paling lama delapan tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, dengan memberikan keterangan kepada Bank Indoensia untuk memeriksa buku-buku dan berkas-berkas yang terdapat pada bank sebagai kewajiban hukum dapat ditafsirkan pengungkapan keterangan sebagai pengecualian. Namun, keterangan yang diperoleh tidak dapat diumumkan kepada pihak lain dan bersifat rahasia.

Apabila Bank Indonesia melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan nasabah yang diungkapkan keterangannya merasa dirugikan, akibatnya bagi Bank Indoesia dapat digugat oleh nasabah, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Pengadilan. Sebaliknya, apabila kepentingan umum menghendaki, dalam bidang perpajakan, perkara pidana, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara, terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan dari bank yang bersangkutan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dengan demikian, rahasia bank dapat dibuka untuk kepentingan umum, walaupun hal-hal tersebut bertentangan dengan kepentingan nasabah penyimpan dana.

2.3.2. Kepentingan Bank Versus Kepentingan Nasabah

Selain benturan antara kepentingan umum dan kepentingan nasabah dapat terjadi benturan antara kepentingan bank dan kepentingan nasabah penyimpan dana. Dalam hal ini bank dapat memilih untuk

mengungkapkan atau tidak mengungkapkan mengenai rahasia bank. Apabila tidak membuka rahasia bank, pihak bank akan dituntut ganti kerugian oleh pihak lawan. Ini berarti bahwa kepentingan bank harus didahulukan supaya bank mengungkapkan hal-hal yang dirahasiakan dengan memperhatikan ketentuan rahasia bank.

Bank akan mengungkapkan rahasia bank atas permintaan Bank Indonesia, setelah pihak yang berkepentingan terhadap perpajakan, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, perkara pidana dengan melalui prosedur Peraturan Bank Indonesia Nomor.2/19/PBI/2000 permintaan BI. Selain itu, bank dapat mengungkapkan untuk kepentingan perkara perdata antara bank dan nasabahnya, informasi antar bank, atas permintaan, persetujuan dan kuasa dari nasabah yang dibuat secara tertulis dan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan.

Bank mempunyai kepentingan untuk mengungkapkan permintaan penyitaan harta kekayaan nasabah penyimpan oleh pihak pengadilan, dalam hal ini rekening nasabah dan simpanannya untuk pelaksanaan putusan hakim ataupun untuk kepentingan perkara yang masih dalam pemeriksaan hakim. Karena dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut

tanpa izin dari siapa pun. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, bank yang berkepentingan dapat membuka rahasia bank untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank walaupun hal tersebut bertentangan dengan kepentingan nasabah. Tujuannya antara lain untuk mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status bank lain. Karena bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi sebelum melaksanakan suatu transaksi dengan nasabah atau bank lain, bank dapat mengungkapkan informasi tersebut kepada bank yang berkepentingan, tanpa harus memperoleh izin dari pihak otoritas tertentu. Uraian tersebut didasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁸

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.³⁹

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan. Penelitian yuridis empiris terutama meneliti data primer.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data guna penulisan Tesis yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Rahasia Bank Menurut Undang – Undang

38 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, halaman 6

39 Sutrisno Hadi, 1993, Metodologi Research Jilid I, Psikologi UGM, Yogyakarta, halaman 4

Nomor 10 Tahun 1998, sedangkan data yang dikumpulkan meliputi bagaimana Pelaksanaan Peraturan Rahasia Bank dewasa ini.

A. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan dalam penelitian hukum ada dua, yaitu metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, dan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan terutama meneliti data primer.⁴⁰

Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk lebih menekankan pada penggunaan sumber-sumber data sekunder dengan analisa yang bersifat kualitatif.⁴¹ Dalam pendekatan yuridis normatif, penelitian yang dilakukan ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan terhadap hukum dengan menggunakan metode yuridis empiris adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku anggota-anggota masyarakat yang mempola.⁴²

Metode pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan peraturan rahasia bank menurut undang – undang nomor 10 tahun 1998, serta untuk melihat implementasi suatu aturan hukum dalam masyarakat (*law in action*) dengan

40 Ronny, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 9.

41 Maria SW Sumardjono, 1989, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, -----, halaman 7

cara menggali keterangan lebih dalam atas hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 khususnya mengenai pelaksanaan rahasia bank, di mana mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku anggota-anggota masyarakat yang mempola.⁴³

Penelitian ini dilakukan untuk mendapat data akurat mengenai rahasia bank. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, karena dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara sistematis mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kerahasiaan bank.

42 Ronny Hanitijo Soemitro, 1991, Majalah Masalah Masalah Hukum Nomor 9, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

43 Lokcit.

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Ditinjau menurut tarafnya, penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu Penelitian Deskriptif dan Penelitian Inferensial. Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahannya saja tanpa berusaha untuk mengambil kesimpulan umum.⁴⁴

Penelitian Inferensial ialah penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan obyek atau masalahnya saja, akan tetapi dengan keyakinan tertentu mengambil kesimpulan-kesimpulan umum dari bahan-bahan obyek permasalahan.⁴⁵

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif, dimana penelitian ini hanya menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahannya saja.

Penelitian tesis ini didasarkan pada sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan sumber data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran buku – buku Hukum Perbankan tentang Kerahasiaan Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia), Transparansi Tingkat Kesehatan Bank, Hukum Perjanjian, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang –

44 Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 16.

45 Ibid, halaman 116.

Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, hasil – hasil seminar dan majalah tentang Rahasia Bank.

C. METODE PENENTUAN SAMPEL

Dalam penelitian mengenai pelaksanaan rahasia bank menurut Undang Undang nomor 10 tahun 1998 ini, metode penentuan sampel yang digunakan penulis adalah teknik *purposive non random sampling*, di mana teknik ini mempunyai ciri-ciri dan keadaan yang sama untuk menjadi sampel.⁴⁶

Lokasi Penelitian diadakan di beberapa Instansi Perbankan di Wilayah Semarang.

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.⁴⁷

Dalam penelitian ini populasinya ditentukan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan rahasia bank menurut Undang Undang nomor 10 tahun 1998 di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, sedangkan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Bank Indonesia Semarang, Bank Mandiri cabang Pahlawan Semarang.

46 Winarno Surakhmad, 1982, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik, Tarsito, Bandung, halaman 9.

47 Ronny, 1990, Op.cit, halaman 44.

Untuk Responden, dalam hal ini adalah menggunakan pendapat dari dua (2) orang staf di bagian Pengawas pada Bank Indonesia Semarang, dan pendapat dari satu (1) orang staf di bagian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) cabang Pahlawan Semarang serta lima (5) orang nasabah yang diambil secara acak.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dari sumber – sumber yang terkait di bidang perbankan. Dalam pengumpulan data primer ini, penulis menggunakan teknik wawancara secara bebas terpimpin. Teknik wawancara adalah proses tanya jawab lisan dalam mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu berperan sebagai penerima informasi dan yang lain sebagai pemberi informasi.⁴⁸

Wawancara dilakukan terhadap pendapat dari tiga (3) orang karyawan bank yang telah ditentukan sebagai sampel dalam penelitian ini, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi

48 Sutrisno Hadi, 1983, Metodologi Research Jilid II, Psikologi UGM, Yogyakarta, halaman 63.

juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.⁴⁹

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, Undang-undang, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.⁵⁰ Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan rahasia bank menurut Undang Undang No. 10 tahun 1998.

E. METODE PENYAJIAN DATA

Data-data yang telah diperoleh penulis baik data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan untuk diteliti kembali dengan menggunakan metode *editing*, di mana untuk menjamin data-data yang diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada, selanjutnya dilakukan pembetulan terhadap data yang keliru, dengan demikian dapat dilakukan penambahan data yang kurang lengkap yang kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian.⁵¹

48 Sutrisno Hadi, 1983, Metodologi Research Jilid II, Psikologi UGM, Yogyakarta, halaman 63.

49 Soerjono Soekanto, 1984, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, halaman 172.

50 Ronny Hantijo Soemitro, 1990, Op.cit., halaman 8-12.

51 Ronny, 1990, Op.cit., halaman 64.

F. METODE ANALISA DATA

Metode yang digunakan adalah metode analisa data yang *deskriptif analitis*, yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti. Di samping itu digunakan juga metode analisa yang kualitatif dengan tujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.⁵²

Adapun *metode kualitatif* adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁵³

52 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1984, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, halaman 20.

53 Ibid, halaman 25.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Peraturan Rahasia Bank Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Dalam pelaksanaan peraturan rahasia bank yang berkembang sampai saat ini, Menurut Khairil Ziyadi, selanjutnya disebut sebagai staf di bagian pengawasan pada Bank Indonesia cabang Semarang, mengatakan bahwa secara eksplisit tidak terdapat undang – undang lain yang mengatur tentang rahasia bank selain Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, meskipun secara implisit pengaturan rahasia bank diatur juga dalam Pasal 25 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.⁵⁴

Sejalan dengan pendapat diatas, Supri Handoyo, selanjutnya disebut sebagai staf di bagian kredit pada Bank Mandiri cabang Pahlawan Semarang, juga mengatakan bahwa belum ada peraturan lain yang mengatur tentang rahasia bank selain Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998.⁵⁵

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Khairil Ziyadi yang selanjutnya disebut staf pengawasan BI Semarang, pada tanggal 10 Februari 2003.

⁵⁵ Wawancara Staf Credit Operation Team Leader PT. Bank Mandiri (Persero), pada tanggal 24 Februari 2003

Lebih lanjut dijelaskan oleh Khairil Ziyadi bahwa, ketentuan rahasia bank yang berlaku sekarang merupakan bagian dari ketentuan Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, begitu juga pada undang – undang sebelumnya, yaitu Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok – pokok perbankan, bahkan sebelum lahirnya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1967 tersebut, rahasia bank diatur tersendiri dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang yaitu Perpu Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia bank.

Diberlakukannya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, telah mengubah beberapa ketentuan di dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Uraian dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank yang selama ini sangat tertutup telah mengalami perubahan. Rahasia bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal – hal yang harus dirahasiakan. Karena adanya kelemahan – kelemahan peraturan rahasia bank selama ini, perlu penerapan rahasia bank menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Kenyataan bahwa lahirnya Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menurut Khairil Ziyadi, selanjutnya disebut sebagai staf di bagian pengawas pada Bank Indonesia cabang Semarang, mengatakan adalah

diakibatkan karena perkembangan yang sangat cepat dalam bisnis perbankan nasional, terutama pada tahun 1997 – 1998 (terjadinya krisis moneter di Indonesia) serta buruknya kinerja perbankan nasional (khususnya tingkat kesehatan bank) sehingga pemerintah memandang perlu untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap Undang - Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 tersebut.⁵⁶

Lebih lanjut dijelaskan bahwa perbedaan yang mendasar menyangkut kerahasiaan bank antara Undang – Undang No 7 Tahun 1992 dengan Undang – Undang No 10 Tahun 1998 adalah dalam hal ruang lingkup keterangan yang wajib dirahasiakan. Pada Undang – Undang No 7 Tahun 1992 yang wajib dirahasiakan adalah keterangan nasabah penyimpan dan nasabah debitur, sedangkan pada Undang – Undang No 10 Tahun 1998 adalah keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya.⁵⁷

Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Perbankan dijelaskan bahwa apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga nasabah debitur, bank tetap wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Artinya, keterangan mengenai nasabah *selain* sebagai nasabah penyimpan *bukan* merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

⁵⁶ Wawancara dengan staf bagian Pengawasan BI Semarang, pada tanggal 17 Februari 2003

⁵⁷ Wawancara dengan staf bagian Pengawasan BI Semarang, pada tanggal 10 Februari 2003

Khairil Ziyadi juga mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan peraturan rahasia bank yang terjadi pasca diberlakukannya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, praktek yang terjadi di dunia Perbankan Nasional dewasa ini, baik yang datang dari praktisi perbankan, nasabah maupun pihak – pihak terafiliasi, menurutnya selama ini tidak pernah terdengar adanya keluhan atau pengaduan mengenai rahasia bank. Bank Indonesia belum menemukan suatu penyimpangan atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh bank pelaksana dalam ketentuan rahasia bank yang dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Namun sebenarnya hal ini tidak dapat dipercayai sepenuhnya dari pendapat yang diberikan tersebut, karena dalam penerapannya kita dihadapkan dengan masalah yang begitu kompleks berkaitan dengan kerahasiaan bank. Dari kenyataan yang ada sungguh ironis jika terjadi ketentuan penerapan hukum yang berlaku sampai meniadakan keadilan akibat penafsiran tentang rahasia bank sehingga menjadikan suatu ketentuan sebagai tameng oleh mereka yang memiliki niat jahat, dan akhirnya berbuat salah bahkan berlindung dibalik ketentuan rahasia bank untuk menutupi adanya kolusi yang terjadi di tubuh bank sendiri, maka tindakan seperti itu sangatlah disesalkan karena dapat mengakibatkan adanya gambaran bahwa bank bisa digunakan dan memberi jalan terhadap perbuatan kriminal.⁵⁸

⁵⁸ Fuady Munir, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998)*, Buku Ke-1, Jakarta, 2000, hal. 90.

Pelaksanaan ketentuan rahasia bank menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, sampai saat ini dipegang teguh oleh Bank Indonesia, bank – bank pelaksana dan pihak – pihak terafiliasi seperti yang dimaksudkan pada pasal 1 butir 1d Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Khusus bagi Bank Indonesia (BI) dalam hal ini kapasitasnya sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, pelaksanaan ketentuan rahasia bank menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut ditindak lanjuti dengan mengeluarkan peraturan lainnya, seperti yang terakhir diperbaharui yaitu Pasal 25 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Lebih lanjut Khairil Ziyadi, selanjutnya disebut sebagai staf di bagian pengawas pada Bank Indonesia mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada pelanggaran dalam kerahasiaan bank yang dilaporkan kepada Bank Indonesia yang telah dilakukan oleh bank – bank pelaksana bahwa bank tetap menjalankan kerahasiaan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Mengenai pelaksanaan peraturan rahasia bank yang terjadi di bank pelaksana, dalam hal ini Bank Mandiri cabang Pahlawan Semarang, telah diambil sebagai salah satu sample dalam penelitian ini tentang bagaimana pelaksanaan peraturan rahasia bank menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Mandiri sebagai bank pelaksana tetap mengacu dan berpedoman pada prinsip yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Supri Handoyo, selanjutnya disebut sebagai staf di bagian

kredit pada Bank Mandiri menegaskan, sampai saat inipun belum ada pelanggaran yang terjadi dalam kerahasiaan bank pasca ditetapkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.⁵⁹

Lebih lanjut Supri Handoyo menjelaskan, bank merupakan suatu lembaga kepercayaan dari masyarakat yang harus menjaga kerahasiaan nasabah dalam kondisi apapun untuk tidak mengungkapkan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kepada pihak lain, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, Pasal 44A (yaitu untuk kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana dan perkara perdata antara bank dan nasabahnya dengan izin Menteri Keuangan, Kejaksaan atau Pengadilan). Lebih ke intern Bank Mandiri, Supri Handoyo memberikan jaminan bahwa secara teknis Bank Mandiri melaksanakan ketentuan yang ada dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pada dasarnya bank dalam pelaksanaan ketentuan mengenai rahasia bank, selalu mengacu pada ketentuan undang – undang yang berlaku, namun tidak menutup kemungkinan untuk membuka rahasia bank untuk kepentingan tertentu sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia menetapkan peraturan pelaksana

⁵⁹ Wawancara dengan Staf Credit Operation Team Leader, PT. Bank Mandiri (Persero) cabang Pahlawan Semarang, pada tanggal 24 Februari 2003.

berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.⁶⁰

Dijelaskan lebih lanjut bahwa terjadinya pelanggaran terhadap kerahasiaan bank, maka akan dikenakan sanksi tertentu sesuai dengan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kenyataannya pelaksanaan peraturan rahasia bank sesuai Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat dikatakan baik pada perbankan dewasa ini, walaupun sebagai suatu proses dan pertimbangan kecepatan barangkali hanya perlu dipikirkan untuk mengkaji kemungkinan pendelegasian wewenang menyetujui pembukaan rahasia bank dari yang selama ini tersentralisir pada Gubernur Bank Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan rahasia bank merupakan suatu upaya dari bank bersangkutan untuk menjaga kepercayaan nasabah kepada bank sehingga nasabah, baik nasabah penyimpan maupun debitor, merasa bahwa kepentingan nasabah tersebut untuk dirahasiakan kondisi keuangannya mendapatkan jaminan yang pasti. Bank sebagai bisnis yang bermodal kepercayaan akan tetap mempertahankan opini bahwa ada pelimpahan rahasia dari nasabah kepada bank yang dapat dijaga.

⁶⁰ Wawancara dengan Khairil Ziyadi pada bagian Pengawas Bank Indonesia Cabang Semarang, pada tanggal 10 Februari 2003.

Kesimpulan secara umum bahwa belum ada keseragaman dalam mengartikan mengenai kerahasiaan bank itu sendiri.

Dalam kerahasiaan bank ini, dilihat dari sudut pandang dan hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa orang nasabah penyimpan dana di bank yang tidak bersedia untuk diketahui identitas, secara umum menyampaikan pandangan dan berpendapat bahwa, untuk mengetahui sejauh mana rahasia bank dapat diterapkan pada nasabah tidaklah menjadi kendala atau permasalahan bagi nasabah. Pada dasarnya peraturan rahasia bank bukan ditujukan kepada nasabah. Nasabah dalam hal ini tidak mempunyai kepentingan akan rahasia bank, oleh karena nasabah tidak dapat mengetahui pelaksanaan rahasia bank, maka dalam hal ini nasabah adalah sebagai objek dari peraturan rahasia bank. Perbankan yang sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat yang berkepentingan melaksanakan peraturan tersebut. Namun tidak ada salahnya untuk mengetahui pendapat versi nasabah dalam pelaksanaan peraturan rahasia bank. Kelompok nasabah penyimpan dana yang nilai nominal simpanannya rata – rata kecil, berbeda pendapatnya dengan nasabah penyimpan dana yang mempunyai nilai nominal simpanan besar. Dalam hal ini penulis tidak dapat memberikan kontribusi yang dinilai penting untuk kerahasiaan bank versi nasabah. Nasabah yang dikategorikan mempunyai simpanan dalam nilai nominal besar tersebut tidak dapat menemukan informasi tentang rahasia bank yang mereka miliki. Oleh karena keterbatasan penulis dalam waktu dan kondisi dalam mendapatkan informasi yang dikategorikan penyimpan dana dengan nilai nominal simpanan yang

besar maka informasi tentang rahasia bank dalam pandangan nasabah hanya dapat ditemukan rata – rata pendapat dari nasabah secara umum.

Kesimpulannya bahwa rata – rata pendapat para nasabah tentang pelaksanaan peraturan rahasia bank tersebut tidak mengetahui secara jauh tentang kerahasiaan bank. Dalam pandangan mereka, rahasia bank sejauh ini bukan menjadi tolak ukur untuk menyimpan uang di bank. Pada dasarnya para nasabah tersebut menyimpan uangnya di bank dikarenakan merasa aman dan mengetahui bank tempat mereka menyimpan uang tersebut adalah dalam kondisi sehat dan bonafid, Dan selain itu para nasabah tersebut tertarik menyimpan uang di bank sebagai salah satunya adalah ketertarikan bunga yang ditawarkan bank. Berbeda dari klasifikasi nasabah dengan nilai nominal simpanan dana yang dimiliki dikategorikan besar maka menurut hemat penulis nasabah tersebut akan menjadikan peraturan rahasia bank adalah hal yang paling utama dalam adanya lembaga bank sebagai penyimpan dana masyarakat. Karena bank adalah pelaksana dari amanat yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menyimpankan uangnya.

Menurut hemat penulis bahwa untuk dapat mengetahui kerahasiaan bank dari nasabah adalah sesuatu yang tidak masuk kedalam logika, karena bagaimanapun rahasia bank adalah dimiliki oleh bank sebagai penyimpan dan penyalur dana masyarakat, dan hal itu adalah merupakan rahasia yang mustahil untuk dapat di buka atau diketahui kerahasiaannya, kecuali yang telah ditentukan didalam undang – undang. Bank tidak akan semudah itu dapat memberikan informasi mengenai nasabahnya karena terikat dengan

adanya peraturan rahasia bank yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan oleh bank yang apabila dilanggar ada sanksi pidana dan sanksi administratif yang akan dikenakan kepada bank tersebut, sesuai dengan peraturan undang – undang perbankan yang berlaku.

Menurut Daeng A.Indra, seorang praktisi Perbankan dari Institusi Bankir Indonesia (IBI) Jakarta, berkaitan dengan perbankan, memberi tanggapan bahwa batasan kerahasiaan bank untuk merahasiakan rahasia dari nasabah, adalah sejauh apabila permasalahan yang timbul tentang kerahasiaan bank tersebut masih dalam taraf suatu penyelidikan, belum melewati proses pengadilan maka hal itu dapat tetap dijadikan suatu kerahasiaan bank, akan tetapi apabila suatu permasalahan dalam kerahasiaan bank diangkat setelah melalui proses hukum dengan melewati proses pengadilan maka hal tersebut bukan lagi menjadi rahasia dalam kerahasiaan bank.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini bahwa masyarakat tetap hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalah gunakan .

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Peraturan Rahasia Bank Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998

Bank adalah lembaga perantara dana (financial intermediary) dengan tugas pokok menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat sehingga dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Kepercayaan dari masyarakat terhadap bank hanya dapat timbul apabila bank dalam kegiatan usahanya mampu melindungi keamanan dana masyarakat yang disimpan di bank.

Dasar hukum ketentuan rahasia bank di Indonesia di atur dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Rahasia bank dirumuskan dalam Pasal 1 butir 28, yaitu “Menurut ketentuan pasal tersebut, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain itu, Pasal 40 ayat (1) memberikan ketentuan, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A. Untuk mengetahui latar belakang pembuat undang – undang mengenai rahasia bank dapat dilihat penjelasan dari pasal tersebut. Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) dikemukakan, “Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara eksplisit memberikan pengecualian dalam tujuh hal. Ketujuh pengecualian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. untuk kepentingan perpajakan kepada pejabat pajak (Pasal 41);
- b. untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara (Pasal 41A);
- c. untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana kepada polisi, jaksa atau hakim (Pasal 42);
- d. dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya (Pasal 43);
- e. dalam rangka tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44);
- f. atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A ayat 1);
- g. dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan (Pasal 44A ayat 2);

Pengecualian tersebut di atas masih dibatasi dengan persyaratan tertentu meliputi ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan perpajakan, keterangan tersebut hanya dapat dilakukan oleh bank setelah adanya perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan dengan menyebutkan nama pejabat pajak dan nasabah wajib pajak yang diperlukan keterangannya.
- b. Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara, keterangan tersebut hanya dapat

dilakukan oleh bank setelah Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin secara tertulis dengan menyatakan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara dan nasabah debitur serta alasan diperlukannya keterangan tersebut.

- c. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, keterangan hanya dapat dilakukan oleh bank setelah Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Mahkamah Agung. Permintaan tersebut harus menyatakan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan tersebut.
- d. Dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya di pengadilan, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.
- e. Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Tukar-menukar informasi antarbank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank. Tujuannya antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank lain. Dengan demikian, bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau bank lain.

- f. Untuk kepentingan nasabah penyimpan atas permintaan, persetujuan atau kuasanya secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.
- g. Untuk kepentingan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan.

Pengecualian terhadap nasabah bank menurut Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 terbatas pada pengecualian yang diberikan berdasarkan Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A, sepanjang tidak diberikan pengecualian oleh Undang-undang lain. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang - Undang No. 10 Tahun 1998, misalnya peraturan pemerintah, tidak dapat memberikan tambahan pengecualian, tetapi hanya mengatur ketentuan pelaksanaan dari Undang - Undang No. 10 Tahun 1998.

Pengecualian yang telah ditentukan oleh Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 bersifat limitatif, maka sekalipun Pimpinan Bank Indonesia telah diberi kewenangan untuk memberikan izin pengecualian, hanya terbatas terhadap pengecualian yang telah ditentukan oleh Pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 42 Undang - Undang No. 10 Tahun 1998, ini berarti Pimpinan Bank Indonesia hanya mempunyai kewenangan untuk memberikan pengecualian berupa perintah tertulis kepada petugas pajak untuk kepentingan perpajakan, kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara untuk penyelesaian piutang

bank dan kepada polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

Ketentuan rahasia bank berlaku terhadap pejabat pajak tergantung atas kapasitas bank saat suatu bank menghadapi pejabat pajak tersebut. Pengecualian pertama yang ditentukan oleh Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 kepada bank untuk mengungkapkan hal yang harus dirahasiakan untuk kepentingan perpajakan kepada pejabat bank. Untuk itu, pejabat pajak dapat memperoleh keterangan dari bank dan melihat bukti- bukti tertulis serta surat-surat mengenai keterangan simpanan dan nasabah penyimpan. Hal tersebut berdasarkan permintaan Menteri Keuangan kepada Pimpinan Bank Indonesia untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat pajak yang ditujukan kepada suatu bank tertentu.

Menurut ketentuan Pasal 41 ayat (1), bank bukan hanya sebagai yang berhak, melainkan sebagai pihak yang diwajibkan untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti - bukti tertulis serta surat - surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan kepada pejabat pajak yang telah membawa perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia kepada bank tersebut. Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 41 ayat (2), dalam perintah teretulis dari Pimpinan Bank Indonesia harus dinyatakan nama pejabat pajak dan nama wajib pajak yang dikehendaki keterangannya. Ini berarti dipastikan kepada setiap pengurus atau pegawai bank jika didatangi oleh seorang pejabat pajak yang akan meminta keterangan mengenai simpanan dan nasabah

penyimpan, bank wajib memperlihatkan bukti - bukti tertulis serta surat - surat diperlukan. Pengurus atau pegawai bank harus menolak permintaan pejabat pajak apabila dalam perintah tertulis tidak dinyatakan nama pejabat pajak yang ditunjuk dan nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya. Hal tersebut untuk menghindarkan sanksi pidana yang kemungkinan dikenakan Undang - Undang Perbankan kepada pihak yang melanggar rahasia bank.

Pengecualian kedua yang ditentukan dalam Pasal 41A Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Menurut ketentuan tersebut, Pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara hanya dapat memperoleh keterangan dari bank mengenai nasabah debitur tersebut, apabila telah mendapat izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia. Permohonan untuk memperoleh izin harus diajukan secara tertulis oleh Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (Pasal 41A ayat 2). Menurut ketentuan tersebut, permintaan sebagaimana dimaksud diatas harus diajukan dengan menyatakan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara, serta nama nasabah debitur dan alasan diperlukannya.

Pengecualian ketiga ditentukan dalam Pasal 42 ayat (1) Undang - Undang No. 10 Tahun 1998. dalam ketentuan pasal tersebut, dinyatakan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pasal 42 ayat (1) menentukan polisi, jaksa, hakim untuk memperoleh keterangan dari

bank tentang tersangka/terdakwa yang menjadi nasabah penyimpan, terlebih dahulu telah mendapat izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia. Permohonan memperoleh izin tersebut, menurut Pasal 42 ayat (2), harus diajukan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (jika keterangan tersebut diperlukan oleh polisi), diajukan oleh Jaksa Agung (jika diperlukan jaksa) atau oleh Mahkamah Agung (jika diperlukan hakim). Pasal 42 ayat (3) ditentukan permintaan tersebut diajukan dengan menyatakan nama jabatan polisi, jaksa atau hakim yang bersangkutan, tersangka/terdakwa, alasan diperlukannya keterangan tersebut. Apabila ketentuan - ketentuan itu tidak dipenuhi, pengurus atau pegawai bank dapat menolak permintaan tersebut.

Ketentuan Pasal 42 Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengharuskan hakim, dalam perkara pidana mendapat izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia, mengajukan permintaan tertulis untuk keperluan memperoleh izin tersebut, melalui Ketua Mahkamah Agung. Hal tersebut tidak tepat dari sudut pandang hukum jika dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang - undang. Ternyata untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, menurut Pasal 42 Undang - Undang No. 10 Tahun 1998, hakim harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Pimpinan Bank Indonesia, sebelum memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan terdakwa yang tercatat pada bank.

2. Benturan Kepentingan Umum dan Kepentingan Nasabah Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998

a. Kepentingan Umum Versus Kepentingan Nasabah

Berdasarkan ketentuan – ketentuan rahasia bank yang telah dibahas sebelumnya, diketahui bahwa rahasia bank tidak bersifat mutlak karena dalam keadaan tertentu dan untuk kepentingan pihak – pihak tertentu rahasia bank dapat dibuka oleh pihak bank tanpa dianggap melanggar ketentuan rahasia bank. Hal tersebut didasarkan dengan pengecualian yang telah ditentukan oleh Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Sejak berlakunya Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, pengecualian rahasia bank yang ditentukan Pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 42 bahwa Pimpinan Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada bank untuk kepentingan perpajakan, urusan piutang dan lelang negara, dan memberi izin tertulis kepada polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana agar bank mengungkapkan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain kepentingan – kepentingan tersebut Pimpinan Bank Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan bank memberikan keterangan dan menyampaikan

dokumen – dokumen selain yang dikecualikan oleh Undang – Undang Perbankan.

Secara universal hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari berbagai jenis tindakan kriminal baik yang berwujud kejahatan maupun pelanggaran. Hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan umum. Pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank yang ditentukan oleh Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 untuk kepentingan umum dan kepentingan bank walaupun hal tersebut bertentangan dengan kepentingan nasabah penyimpan dana. Namun, pengecualian terhadap rahasia bank untuk kepentingan umum wajib melalui prosedur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin atau Perintah Membuka Rahasia Bank, prosedur pemberian izin oleh Pimpinan Bank Indonesia ditentukan dalam beberapa pasal. Dalam Pasal 4 Surat Keputusan tersebut dinyatakan hal berikut :

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti – bukti tertulis serta surat – surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan kepada pejabat pajak.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Menteri Keuangan dengan mencantumkan :

- a. nama dan jabatan pejabat pajak;
- b. nama nasabah penyimpan dana sebagai wajib pajak yang dikehendaki keterangannya;
- c. nama kantor bank tempat nasabah mempunyai simpanan;
- d. keterangan yang diminta; dan
- e. alasan diperlukannya keterangan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia tersebut menguraikan selain melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas, Pimpinan Bank Indonesia melakukan tindakan sebagai berikut :

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat tersebut untuk memperoleh keterangan dari bank yang bersangkutan, mengenai simpanan nasabah debitur.
- (2) Izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis berdasarkan permintaan tertulis dari kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Lelang Negara.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mencantumkan :

- a. nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara;
- b. nama nasabah debitur yang mempunyai simpanan;
- c. nama kantor bank tempat nasabah debitur mempunyai simpanan;
- d. keterangan yang diminta;
- e. alasan diperlukannya keterangan.

Selain itu, ketentuan Pasal 6 menguraikan hal – hal sebagai berikut :

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis berdasarkan permintaan tertulis dari Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mencantumkan :
 - a. nama, pangkat, NRO/NIP dan jabatan jaksa, polisi atau hakim;

- b. nama tersangka/terdakwa yang mempunyai simpanan;
- c. nama kantor bank tempat tersangka/terdakwa mempunyai simpanan;
- d. keterangan yang diminta;
- e. maksud pemeriksaan atau alasan diperlukannya keterangan;
- f. hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Permintaan izin untuk membuka rahasia bank tersebut ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tersebut ditujukan kepada Pimpinan Bank Indonesia agar diperhatikan Urusan Hukum Bank Indonesia Gedung Tipikal Lantai 10. Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10010.

Penandatanganan surat permintaan izin untuk membuka rahasia bank ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) harus ditandatangani oleh Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan, Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara untuk penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan dan Piutang Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara, sedangkan Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, atau Ketua Mahkamah Agung untuk kepentingan peradilan pidana.

Penandatanganan permintaan tersebut dengan membubuhkan tanda tangan basah.

Berdasarkan permintaan izin untuk membuka rahasia bank dalam Pasal 8 (1), dinyatakan Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin atau perintah untuk membuka rahasia bank harus dilakukan selambat – lambatnya empat belas hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap. Apabila permintaan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) menentukan Pimpinan Bank Indonesia dapat menolak untuk memberikan izin untuk membuka rahasia bank. Penolakan oleh Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus dilakukan selambat – lambatnya empat belas hari setelah permintaan diterima secara lengkap. Dengan demikian, surat penolakan untuk memberikan izin atau pemberian untuk membuka izin harus ditandatangani oleh Pimpinan Bank Indonesia dalam hal ini Gubernur Bank Indonesia atau pengganti Gubernur Bank Indonesia dalam hal berhalangan.

Berkaitan dengan uraian di atas, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali sebagaimana diatur oleh Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tindakan membocorkan rahasia bank, atau memaksa suatu pihak membocorkan rahasia bank, ditetapkan sebagai tindak pidana

kejahatan dengan ancaman pidana penjara dan denda yang berat. Tujuannya supaya terbentuk ketaatan terhadap ketentuan rahasia bank. Kewajiban menjaga rahasia bank diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank, apabila ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan tidak akan disalahgunakan.

Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank dalam Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 pada umumnya diklasifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan. Pembentuk undang – undang dalam hal ini memandang perlu memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelanggar ketentuan rahasia bank, yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 47 ayat (1) menetapkan bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang – kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun serta denda sekurang – kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- b. Pasal 47 ayat (2) menetapkan bahwa anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, menurut Pasal 40 diancam dengan pidana penjara sekurang – kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun serta denda sekurang – kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- c. Pasal 47A menetapkan bahwa anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A diancam dengan pidana penjara sekurang – kurangnya dua tahun dan paling lama tujuh tahun serta denda sekurang – kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya, ternyata perlindungan rahasia bank di Indonesia termasuk ketentuan yang ketat dengan pengecualian yang limitatif. Dalam Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 ditentukan bahwa pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran pidana (*criminal Violation* atau *criminal offence*). Khusus untuk pengecualian yang ditentukan dalam Pasal 43, yaitu dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dan Pasal 44 yaitu dalam rangka tukar menukar informasi antarbank serta Pasal 44A yaitu atas

UPT-PUSTAKA-UNDIP

permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan berikut ahli warisnya, bank tidak memerlukan izin dari siapapun. Namun, kenyataannya penyimpanan dana pada bank bersifat dilematis, di satu pihak rahasia bank diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat untuk menjamin kelangsungan usaha bank, dilain pihak dapat digunakan sebagai alasan oleh pihak – pihak tertentu yang beritikad tidak baik. Sebagai contoh memanfaatkan rekening untuk menampung dana ilegal. Pada saat rekening akan diperiksa nasabah yang bersangkutan keberatan dengan dalih ketentuan rahasia bank.

Beberapa perbedaan selalu menjadi legal issue mengenai apakah yang perlu dilindungi hanya kepentingan nasabah yang bersangkutan secara individual, ataukah terkait juga kepentingan – kepentingan bank serta kepentingan masyarakat umum berkaitan dengan berlakunya ketentuan rahasia bank di masing – masing negara. Selain itu, yang menjadi legal issue sampai sejauh mana kepentingan nasabah yang bersangkutan wajib dilindungi dalam hal perlunya diungkapkan keterangan mengenai simpanan dan nasabah penyimpan serta transaksi nasabah dengan bank yang bersangkutan. Apabila terjadi benturan kepentingan antara kepentingan nasabah dan kepentingan umum, serta benturan antara kepentingan nasabah dan kepentingan bank, hal – hal

tersebut telah diatur dalam ketentuan yang menyangkut pengecualian atas kewajiban bank untuk memegang teguh rahasia bank.⁶¹

Perkembangan keadaan politik dalam negeri, keadaan sosial, terutama menyangkut timbulnya kejahatan – kejahatan di bidang *money laundering*, dan kebutuhan akan adanya stabilitas ekonomi, terutama stabilitas moneter. Hal tersebut telah menimbulkan kebutuhan akan perlunya pelonggaran terhadap kewajiban rahasia bank apabila kepentingan bangsa dan masyarakat umum didahulukan daripada kepentingan nasabah bank. Sebaliknya, dalam hal – hal tertentu untuk kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat umum kewajiban rahasia bank diperketat, dengan alasan pertimbangan demi berhasilnya pengerahan tabungan masyarakat oleh perbankan dan terjaminnya stabilitas moneter yang dapat terganggu jika kepercayaan masyarakat terhadap perbankan runtuh.⁶² Selanjutnya, bagaimana halnya dengan tugas pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia yang memerlukan rincian mengenai simpanan nasabah penyimpan tertentu dari suatu bank yang diwajibkan oleh Undang – Undang Perbankan ? Walaupun pengungkapan keterangan oleh suatu bank mengenai “nasabah penyimpan dan simpanannya”, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut ketentuan rahasia bank dalam dunia perbankan kepada Bank

⁶¹ Remy Sjahdeni. Op cit. hal. 4.

⁶² Ibid , hal. 11.

Indonesia, tidak disebutkan secara eksplisit merupakan pengecualian, tetapi secara implisit pengungkapan keterangan tersebut kepada Bank Indonesia merupakan pengecualian.

Apabila diperhatikan, Bank Indonesia dapat memperoleh informasi dari bank mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan. Hal ini dimaksudkan supaya dapat dilakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana fungsi tersebut ditetapkan oleh Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang No. 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Berikutnya pengungkapan keterangan oleh suatu bank kepada Bank Indonesia merupakan kewajiban hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, bank wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Bank Indonesia dan bank wajib memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia untuk memeriksa buku – buku dan berkas – berkas bank.

Pembentuk undang – undang memandang perlu menetapkan ketentuan berkaitan dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia seperti dinyatakan sebagai berikut :

- a. Pasal 30 ayat (1) Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 menetapkan bahwa bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala

keterangan dan penjelasan mengenai usaha menurut tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia.

- b. Pasal 30 ayat (2) menetapkan bahwa bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku – buku dan berkas – berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan tersebut, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Atas permintaan Bank Indonesia, bank berkewajiban memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku – buku dan berkas – berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan tentang kesehatan bank tidak diumumkan dan bersifat rahasia. Kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan usaha suatu bank kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan dari suatu bank. Pemantauan terhadap keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka

melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan.

Apabila bank melakukan pelanggaran terhadap kewajiban untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana ? Sanksi administratif seperti denda dan pencabutan izin usaha dapat juga dikenakan oleh Bank Indonesia kepada bank yang bersangkutan. Selain itu, direksi bank yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana penjara yang sangat berat seperti ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) bahwa anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan hal – hal berikut :

- (1) Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan peibadinya atau keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat – surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kerditnya pada bank.

- (2) Tidak melaksanakan langkah – langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang – undang ini dan ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang – kurangnya tiga tahun dan paling lama delapan tahun serta denda sekurang – kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, dengan memberikan keterangan kepada Bank Indonesia untuk memeriksa buku – buku dan berkas – berkas yang terdapat pada bank sebagai kewajiban hukum dapat ditafsirkan pengungkapan keterangan sebagai pengecualian. Namun, keterangan yang diperoleh tidak dapat diumumkan kepada pihak lain dan bersifat rahasia.

Apabila pihak Bank Indonesia melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, dan nasabah yang diungkapkan keterangannya merasa dirugikan, akibatnya bagi Bank Indonesia dapat digugat oleh nasabah, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana di Pengadilan. Sebaliknya, apabila kepentingan umum menghendaki, dalam bidang perpajakan, perkara pidana, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara, terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan dari bank yang

bersangkutan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dengan demikian, rahasia bank dapat dibuka untuk kepentingan umum, walaupun hal – hal tersebut bertentangan dengan kepentingan nasabah penyimpan dana.

b. Kepentingan Bank Versus Kepentingan Nasabah

Selain benturan antara kepentingan umum dan kepentingan nasabah dapat terjadi benturan antara kepentingan bank dan kepentingan nasabah penyimpan dana. Dalam hal ini bank dapat memilih untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan mengenai rahasia bank. Apabila tidak membuka rahasia bank, pihak bank akan dituntut ganti rugi oleh pihak lawan. Ini berarti bahwa kepentingan bank harus didahulukan supaya bank mengungkapkan hal-hal yang dirahasiakan dengan memperhatikan ketentuan bank.

Bank akan mengungkapkan rahasia bank atas permintaan Bank Indonesia, setelah pihak yang berkepentingan terhadap perpajakan, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, perkara pidana dengan melalui prosedur yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 permintaan BI. Selain itu, bank dapat mengungkapkan untuk kepentingan perkara perdata antara bank dan nasabahnya, informasi antar bank, atas permintaan, persetujuan dan kuasa dari nasabah yang dibuat secara tertulis dan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan.

Bank mempunyai kepentingan untuk mengungkapkan permintaan penyitaan harta kekayaan nasabah penyimpan oleh pihak pengadilan, dalam hal ini rekening nasabah dan simpanannya untuk pelaksanaan putusan hakim atau pun untuk kepentingan perkara yang masih dalam pemeriksaan hakim. Karena dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut tanpa izin dari siapa pun. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Dalam rangka tukar – menukar informasi antar bank, bank yang berkepentingan dapat membuka rahasia bank untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank walaupun hal tersebut bertentangan dengan kepentingan nasabah. Tujuannya antara lain untuk mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status bank lain. Karena bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi sebelum melaksanakan suatu transaksi dengan nasabah atau bank lain, bank dapat mengungkapkan informasi tersebut kepada bank yang berkepentingan, tanpa harus memperoleh izin dari pihak otoritas tertentu. Uraian tersebut didasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Eksistensi rahasia bank berlaku hampir di setiap negara berarti sifatnya universal, tetapi dasar hukum dan ruang lingkupnya rahasia bank berbeda-beda di setiap negara. Ada suatu negara yang mengatur rahasia

bank sebagai kewajiban perdata seperti di negara Inggris dan banyak negara - negara lain yang menganut *common law system*. Selain itu, ada yang menentukan rahasia bank sebagai kewajiban pihak dengan sanksi pidana seperti di negara Indonesia.

Di antara banyak negara sudah tentu terdapat beberapa perbedaan berkaitan dengan pengecualian rahasia bank. Hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan mengenai kewajiban rahasia bank yang dapat diungkapkan tanpa harus ada izin dari otoritas tertentu yang berwenang untuk memberikan pengecualian diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia, sedangkan di negara - negara lain izin tersebut diberikan oleh lembaga pengadilan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini maka Pelaksanaan peraturan rahasia bank yang berlaku saat ini merupakan bagian dari ketentuan dari peraturan rahasia bank menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, begitu juga pada undang – undang sebelumnya yaitu Undang – Undan Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok – pokok perbankan, bahkan sebelum lahirnya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1997 tersebut, rahasia bank diatur tersendiri dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang yaitu Perpu Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia bank.

Diberlakukannya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, telah mengubah beberapa ketentuan didalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Uraian dalam penjelasan Undang –

Undang Nomor 10 Tahun 1998, dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan, ketentuan dari peraturan rahasia bank yang selama ini sangat tertutup telah mengalami perubahan.

Rahasia bank yang dimaksud adalah merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal – hal yang harus dirahasiakan. Karena adanya kelemahan – kelemahan peraturan rahasia bank selama ini, maka diperlukan penerapan rahasia bank menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pada kenyataannya dalam dunia perbankan dewasa ini, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 lahir adalah diakibatkan karena perkembangan yang sangat cepat dalam bisnis perbankan nasional, terutama dikarenakan pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 telah terjadi krisis moneter di Indonesia serta buruknya kinerja perbankan nasional sehingga dalam hal ini pemerintah memandang perlu untuk melakukan perubahan – perubahan terhadap Undang – Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tersebut.

Dalam hal perbedaan yang terjadi dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1998 dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah dalam hal ruang lingkup keterangan yang wajib dirahasiakan. Pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang wajib dirahasiakan adalah keterangan mengenai nasabah penyimpan dan nasabah debitur,

sedangkan pada Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Pada dasarnya bahwa pelaksanaan peraturan rahasia bank dewasa ini adalah dinilai baik pelaksanaannya, dimana ketentuan rahasia bank tetap dipegang teguh dan dilaksanakan sesuai menurut undang – undang yang berlaku, baik itu oleh bank pelaksana dan pihak – pihak terafiliasi seperti yang termaksud pada Pasal 1 butir 1d Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Bank merupakan suatu lembaga kepercayaan dari masyarakat yang harus menjaga kerahasiaan nasabah dalam kondisi apapun untuk tidak mengungkapkan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kepada pihak lain, kecuali yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44A (yaitu untuk kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana dan perkara perdata antara bank dan nasabahnya dengan izin Menteri Keuangan, Kejaksaan atau Pengadilan).

Dalam pelaksanaan ketentuan rahasia bank, pada dasarnya bank selalu mengacu pada ketentuan undang – undang yang berlaku, namun tidak menutupi kemungkinan untuk membuka rahasia bank untuk kepentingan tertentu sebagaimana telah diatur dalam peraturan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sehubungan dengan masalah ketentuan rahasia bank tersebut, maka Bank Indonesia telah menetapkan peraturan pelaksana yaitu berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI),

Nomor 2/19/PBI/2000, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia bank.

Dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, rahasia bank dirumuskan dalam Pasal 1 butir 28, dan Pasal 40 ayat (1) memberikan ketentuan “bank wajib menjaga, merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44A”.

Pelanggaran terhadap kerahasiaan bank, maka akan dikenakan sanksi tertentu sesuai dengan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pelaksanaan peraturan rahasia bank adalah suatu upaya dari bank bersangkutan untuk menjaga kepercayaan nasabah kepada bank sehingga nasabah, baik nasabah penyimpan maupun debitur, merasa bahwa kepentingan nasabah tersebut untuk dirahasiakan kondisi keuangannya mendapat jaminan yang pasti. Bank sebagai bisnis yang bermodalkan kepercayaan dari masyarakat akan tetap mempertahankan opini bahwa ada pelimpahan rahasia dari nasabah kepada bank yang dapat dijaga kerahasiaannya.

Menariknya persoalan rahasia bank tersebut mengingat di satu segi masyarakat ingin mengetahui tentang kondisi keuangan suatu debitur yang berada di suatu bank, apakah bank tersebut sehat atau tidak, bermasalah atau tidak, tetapi dilain pihak bank atau pihak ketiga terbentur oleh aturan hukum yang menyangkut rahasia bank.

Dengan adanya dalil “rahasia perbankan” timbul kesan seolah – olah pihak bank menyembunyikan kebobrokan keuangan sebuah perusahaan (debitur) yang kebetulan menjadi sorotan publik. Seringkali timbul kesan seolah – olah kalangan perbankan bersembunyi dibalik kaidah rahasia perbankan untuk melindungi nasabahnya (yang belum tentu benar).⁶³

Dalam undang – undang perbankan telah ditegaskan bahwa pihak – pihak yang dapat diberikan izin untuk mempelajari keuangan nasabah itu adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat pajak yang bertugas memeriksa kekayaan wajib pajak dalam rangka meneliti apakah tidak terjadi penyimpangan terhadap pembayaran pajak.
- b. Polisi yang sedang melakukan penyelidikan terhadap tersangka yang melakukan tindakan pidana, sehingga polisi memandang perlu untuk mengetahui keadaan keuangan tersangka dari bank.
- c. Jaksa yang sedang melakukan penyidikan lanjutan/penuntutan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana.
- d. Hakim yang sedang memeriksa kasus pidana terhadap terdakwa.

Izin dari Menteri Keuangan untuk melihat catatan keuangan tersangka /terdakwa nasabah bank tersebut baru dapat dikabulkan apabila

⁶³ Asikin Zainal, Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia, hal. 51.

adanya permohonan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), Jaksa Agung (KEJAGUNG) dan Mahkamah Agung sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Prosedur yang dimaksud disini adalah menyangkut kejelasan tentang nama, pangkat, NRP/NIP, jabatan, maksud pemeriksaan, nama nasabah yang akan diperiksa menjadi terdakwa dan sebab – sebab keterangan diperlukan.

Ada dua teori tentang kekuatan berlakunya asas rahasia bank ini, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Mutlak

Dalam teori ini, rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapapun dan dalam hal apapun. Dewasa ini hampir tidak ada lagi negara yang menganut teori mutlak ini. Bahkan negara – negara yang menganut perlindungan nasabah secara ketat seperti bank Swiss atau negara – negara tax heaven seperti kepulauan Bahama atau Cayman Island, juga telah membenarkan membuka rahasia bank dalam hal – hal khusus.

2. Teori Relatif

Menurut teori ini, rahasia bank tetap diakui tetapi dalam hal – hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos. Misalnya untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana.

Indonesia dalam hal ini adalah menganut teori mutlak atau dikenal juga sebagai Teori Nisbi, dimana dalam hal – hal tertentu rahasia bank dapat dibuka berdasarkan prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Untuk dapat mengetahui apakah prinsip rahasia bank dilaksanakan oleh sesuatu bank atau tidak, ada klarifikasinya sebagai berikut:

1. Apakah informasi tersebut termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank, yang dalam Pasal 40 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan tegas dan gamblang menyebutkan bahwa yang tergolong kedalam rahasia bank adalah hanya keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
2. Apakah informasi tersebut disampaikan oleh pihak – pihak yang memang dilarang oleh perundang – undangan yang berlaku, yang dapat dilihat dari pengertian Pasal 1 ayat (16).

Untuk rahasia bank ini, peraturan perundang – undangan membuka perkecualian – perkecualian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan perpajakan, harus diberi izin tertulis dari Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan.
2. Untuk kepentingan pidana, yang harus diberi izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan dari Polisi, Jaksa atau Hakim.

3. Untuk kepentingan Peradilan perdata antara bank dan nasabahnya yang harus diberikan izin dari Direksi Bank, menginformasikannya kepada pengadilan.
4. Dalam hal kepentingan tukar menukar informasi antar bank, Direksi Bank memberitahukan kepada bank lain.
5. Untuk kepentingan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara /Panitia Urusan Piutang Negara yang harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan tertulis dari Kepala BUPLN/PUPN.
6. Untuk kepentingan pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan Panitia Urusan Piutang, harus mendapat izin dari bank tersebut atas permintaan / persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan.

Apabila terdapat pihak yang memaksa bank dan pihak terafiliasi untuk membuka rahasia bank akan terkena sanksi yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) sebagai berikut “Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, dengansengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang – kurangnya dua (2) tahun dan paling lama empat (4) tahun serta denda sekurang – kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan, ternyata perlindungan rahasia bank di Indonesia termasuk ketentuan yang ketat dengan pengecualian yang limitit. Dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 ditentukan bahwa pelanggaran terhadap peraturan rahasia bank adalah sebagai pelanggaran pidana (criminal violation atau criminal offence).

Dilihat dari benturan kepentingan umum dan kepentingan nasabah menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 maka, apabila terjadi benturan – benturan antara kepentingan nasabah dan kepentingan umum, serta benturan antara kepentingan nasabah dan kepentingan bank, hal - hal tersebut telah diatur dalam ketentuan yang menyangkut pengecualian atas kewajiban bank untuk memegang teguh rahasia bank.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mengadakan pembahasan tentang pelaksanaan Peraturan Rahasia Bank di wilayah pemerintah Kota Semarang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Rahasia Bank menurut Undang – Undang . Nomor 10 tahun 1998, bahwa Perbankan di Indonesia dalam operasional saat ini masih tetap berpegang teguh melaksanakan rahasia bank sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang – undang Perbankan yaitu Undang – Undang No. 10 Tahun 1998. Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan bank telah menindak lanjuti dengan mengeluarkan aturan – aturan pelaksana yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara kepentingan umum dan kepentingan nasabah bank, maka dapat diberlakukan ketentuan rahasia bank menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu, bahwa kepentingan umum dan kepentingan bank tersebut wajib didahulukan dengan mengungkapkan hal – hal yang wajib dirahasiakan, dimana pemberlakuan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam

pengungkapan rahasia bank diperlukan untuk kepentingan bank dalam rangka ketaatan bank terhadap ketentuan rahasia bank.

Namun pengungkapan rahasia bank tersebut wajib mengikuti batasan dengan persyaratan tertentu yang dinyatakan oleh undang – undang perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal., *Pokok – Pokok Hukum Perbankan di Indonesia.*,
- Biro Hukum Bank Indonesia., *"Rahasia Bank dan Pemblokiran Rekening"*.
Jakarta, 21 Januari 1998.
- Djuhendah, Hasan., *Transparansi Tingkat Kesehatan Bank.*, Badan Pembinaan
Hukum Nasional, 1996.
- Djumhana, Muhamad., *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di
Indonesia).*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Fuady, Munir., *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan UU. No. 10 Tahun
1998.*,
- Hadi, Sutrisno., *Metodologi Research Jilid I.*, Yogyakarta: Psikologi UGM, 1993.
- Pangaribuan, Emmy., *"Perlindungan Hukum Yang Diberikan oleh Bank
Terhadap Keamanan Simpanan Nasabah."* Jakarta, 24 Juni 1997.
- Sadikin., *"Laporan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Perbankan tentang
Kerahasiaan Bank."* Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen
Kehakiman Republik Indonesia, Tahun 1995/1996.
- Setiawan., *"Bank dan Nasabah Antara Hukum dan Kepercayaan."* Varia
Peradilan (No. 71 : 119 – 131).
- Simorangkir, O.P., *Seluk Beluk Bank Komersial. Cet. I.*, Jakarta: STIE \ Perbanas,
1976.
- , *Dasar – dasar dan Mekanisme Komersial Perbankan.* Jakarta:
Yagrat, 1983.
- Subektio, R., *Hukum Perjanjian. Cet.4.*, Jakarta: Intermasa, 1976.
- Suyatno, Thomas. Dkk., *Kelembagaan Perbankan. Cet. I.*, Jakarta: STIE Perbanas
Gramedia, 1988.

Sjahdeini, Sutan Remy., *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Cet.1*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

-----, *"Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi Hukum Perbankan Indonesia."* Jakarta, 8 April 1997.

-----, *"Rahasia Bank Suatu Dilema."* Jakarta 15 September 1997.

-----, *"Keadaan Perbankan Indonesia dan Upaya – upaya Penyehatunnya."* Jakarta, 8 Juni 1998.

Soemitro, R. Hanitjo., *Majalah Masalah – Masalah Hukum Nomor 9*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Soemitro, R. Hanitjo., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soekanto, Soerjono., *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1984.

Widjanarto., *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia. Cet.2*, Jakarta: Grafiti, 1993.

Peraturan Perundang – undangan.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. Cet.24, Jakarta: Pradya Paramita, 1992.

Himpunan Ketentuan Perbankan Tanggal 25 Januari 1995. Jakarta: Jembar Inti Jaya, 1995.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun tentang Perbankan. Jakarta: BP. Cipta Jaya, 1999.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1990 tentang Bank Indonesia. Jakarta: BP. Cipta Jaya, 1999.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000, tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.